



LINEAMENTA SEJARAH PILKADA MANGGARAI BARAT 2005 – 2024

Kris Bheda Somerpes



**LINEAMENTA SEJARAH
PILKADA MANGGARAI BARAT
2005 – 2024**

Kris Bheda Somerpes

@2025

**Puslitbang
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Manggarai Barat**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya buku *Lineamenta Sejarah Pilkada Manggarai Barat (2005– 2024)* ini dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa demokrasi lokal, khususnya praktik pemilihan kepala daerah, bukan sekadar peristiwa politik lima tahunan, melainkan juga cermin perjalanan suatu masyarakat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kabupaten Manggarai Barat, sejak resmi berdiri pada tahun 2003, telah melalui lima kali pemilihan kepala daerah secara langsung. Setiap periode memiliki dinamika tersendiri: dari transisi awal pembentukan daerah, euforia demokrasi pada pilkada pertama, fragmentasi politik yang kompleks, hingga tantangan besar seperti sengketa hukum, pandemi, dan perubahan konstelasi nasional. Semua pengalaman ini bukan hanya berharga bagi masyarakat Manggarai Barat, tetapi juga menjadi referensi penting dalam memahami praktik demokrasi di tingkat lokal Indonesia.

Buku ini disusun dengan tiga tujuan utama. Pertama, sebagai dokumentasi sejarah agar perjalanan demokrasi di Manggarai Barat memiliki arsip yang rapi dan dapat diwariskan bagi generasi mendatang.

Kedua, sebagai bahan analisis yang memberikan gambaran mengenai perubahan sosial-politik, dinamika partai, serta pergeseran kepemimpinan daerah. Ketiga, sebagai refleksi kritis agar pengalaman masa lalu dapat

dijadikan pelajaran untuk memperkuat praktik demokrasi lokal di masa depan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, para tokoh masyarakat, akademisi, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa data, masukan, maupun semangat dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi para penyelenggara pemilu, peneliti, dan mahasiswa, tetapi juga bagi masyarakat luas yang peduli terhadap perjalanan demokrasi di daerah.

Labuan Bajo, 25 April 2025

Kris Bheda Somerpes

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
MANGGARAI BARAT: DARI PESISIR FLORES KE PANGGUNG OTONOMI	4
Letak Geografis dan Lanskap Wilayah	4
Kondisi Sosial-Ekonomi dan Iklim	6
Sejarah Perjuangan Pemekaran	7
Pengesahan Kabupaten Manggarai Barat	10
BAB III	
MASA TRANSISI: DARI PEJABAT BUPATI KE PANGGUNG DEMOKRASI	12
BAB IV	
MUNCULNYA PILKADA LANGSUNG: AWAL DEMOKRASI DI MANGGARAI BARAT	14

BAB V

**LINEAMENTA SEJARAH PILKADA
MANGGARAI BARAT (2005–2024)** 17

Pilkada Pertama (2005): Menentukan
Nahkoda Perdana 18

Pilkada Kedua (2010): Politik Makin Ramai,
Hukum Menguji 24

Pilkada Ketiga (2015): Antara Kontinuitas,
Sengketa, dan Jejak Sejarah Wakil Bupati
Perempuan 33

Pilkada Keempat (2020): Generasi Baru di
Tengah Pandemi 41

Pilkada Kelima (2024): Pertarungan Dua
Poros, Kemenangan Tipis, dan Sengketa di
Meja Konstitusi 47

BAB VI

ANALISIS DAN SINTESIS POLITIK LOKAL 55

Tren Partisipasi Pemilih (2005–2024) 55

Pola Pergeseran Partai Politik dan Koalisi 59

Dinamika Figur dan Regenerasi
Kepemimpinan 63

Dinamika Sengketa 67

Peran Masyarakat Sipil, Media, dan Adat
dalam Pilkada 72

Implikasi Ekonomi dan Pariwisata terhadap
Politik Lokal 75

Evaluasi Kelembagaan 78

BAB VII	
PENUTUP	82
DAFTAR PUSTAKA	86
PROFIL PENULIS	91

BAB I PENDAHULUAN

Kalau kita bicara tentang perjalanan demokrasi di Nusa Tenggara Timur, nama Manggarai Barat punya cerita yang berbeda dari daerah lainnya. Kabupaten ini relatif muda karena baru resmi berdiri pada 2003¹ setelah perjuangan panjang dari para tokoh lokal, aspirasi masyarakat, dan keputusan politik nasional.² Dari sebuah wilayah di ujung barat Flores yang dulu hanya dikenal sebagai pintu menuju Taman Nasional Komodo,³ Manggarai Barat kini menjelma menjadi panggung politik lokal yang dinamis tempat para tokoh, partai, dan masyarakat saling bertemu, bersaing, dan menentukan arah daerahnya sendiri.

Mengapa sejarah Pilkada Manggarai Barat perlu ditulis. Jawabannya tunggal, yakni karena di sinilah kita bisa melihat bagaimana desain demokrasi nasional benar-benar diuji di lapangan.⁴ Pilkada di Manggarai Barat bukan hanya tentang memilih bupati dan wakil bupati, melainkan tentang bagaimana masyarakat belajar mengelola perbedaan, membangun kesepakatan, dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

² Kabupaten Manggarai Barat diresmikan sebagai daerah otonom pada 25 Februari 2003 atau pada ketika UU 8 Tahun 2003 resmi diundangkan.

³ Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, “Sekilas Kabupaten Manggarai Barat”, diakses dari <https://manggarai-baratkab.go.id/halaman/sekilas-kabupaten-manggarai-barat.html>.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

menjaga agar roda pemerintahan tetap berputar meski badai politik sesekali mengguncang. Ia adalah cermin: dari harapan, konflik, kompromi, hingga lahirnya kepemimpinan baru yang membawa warna berbeda bagi daerah ini.

Dokumentasi sejarah seperti ini bukan sekadar catatan angka dan nama. Ini adalah jejak perjalanan tentang siapa yang bertarung, bagaimana masyarakat merespons, apa saja tantangan yang muncul, dan bagaimana setiap proses akhirnya membentuk wajah politik Manggarai Barat hari ini. Dengan merekamnya secara runtut, kita bisa menengok ke belakang bukan untuk bernostalgia, tetapi untuk belajar perihal apa yang berhasil, apa yang kurang, dan bagaimana memperbaikinya ke depan.

Naskah ini disusun dengan tiga tujuan utama. *Pertama*, sebagai arsip resmi, agar setiap proses demokrasi di Manggarai Barat punya rekam jejak yang rapi dan bisa menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, akademisi, maupun masyarakat umum. *Kedua*, sebagai bahan analisis, supaya kita dapat melihat lebih jelas arah perubahan politik lokal: bagaimana partai bergerak, bagaimana tokoh lama bertahan atau digantikan oleh wajah baru, dan bagaimana partisipasi masyarakat berkembang. *Ketiga*, sebagai refleksi, untuk memetik pelajaran dari dua dekade perjalanan Pilkada ini sebagai pelajaran yang penting bagi masa depan demokrasi lokal, bukan hanya di Manggarai Barat, tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang punya cerita serupa.

Kisah yang disajikan dalam naskah ini membentang dari masa awal pembentukan Kabupaten Manggarai Barat, penunjukan pejabat bupati pertama, hingga lima kali

pemilihan kepala daerah secara langsung. Setiap periode membawa dinamika yang berbeda: dari kontestasi yang sederhana hingga pertarungan politik yang sengit; dari dominasi figur tertentu hingga terjadinya pergeseran generasi kepemimpinan yang mengubah lanskap politik lokal.

Sumber data yang digunakan pun beragam. Naskah ini merujuk pada arsip resmi KPU, dokumen pemerintah, putusan pengadilan, hingga peraturan perundang-undangan yang relevan. Semua informasi tersebut dirangkai secara deskriptif dan analitis, namun disajikan dengan bahasa yang mudah dicerna, agar sejarah Pilkada Manggarai Barat tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan dirasakan sebagai bagian dari perjalanan bersama menuju demokrasi yang semakin matang.

BAB II

MANGGARAI BARAT: DARI PESISIR FLORES KE PANGGUNG OTONOMI

Sebelum menelusuri jejak panjang Pilkada dan dinamika politik yang mewarnai Manggarai Barat, penting untuk memahami dulu panggung tempat seluruh proses itu berlangsung. Setiap kisah demokrasi tidak pernah lahir di ruang kosong; ia selalu berakar pada kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan sejarah masyarakat yang menghidupinya. Manggarai Barat, yang terhampar di ujung barat Pulau Flores, bukan sekadar latar fisik, melainkan juga kerangka pembentuk identitas dan arah perjalanan daerah ini. Dari lanskap kepulauan yang menawan hingga sejarah panjang perjuangan pemekaran, semua elemen tersebut memberi warna tersendiri pada cara demokrasi lokal tumbuh dan beradaptasi. Bab ini mengajak kita menyusuri Manggarai Barat dari sisi letak, potensi, dan perjalanan menuju statusnya sebagai kabupaten otonom sebagai sebuah fondasi yang kelak menentukan arah kontestasi politik di masa-masa berikutnya.

Letak Geografis dan Lanskap Wilayah

Di ujung barat Pulau Flores, di tepian perairan yang berhadapan langsung dengan Selat Sape dan Laut Flores, terbentang sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Manggarai Barat. Dari Labuan Bajo, kota yang kemudian tumbuh menjadi pusat pemerintahan dan pariwisata, bila pandangan diarahkan ke barat, garis

cakrawala dihiasi oleh pulau-pulau kecil yang seperti taburan mozaik di atas birunya laut: Rinca, Komodo, Longos, Seraya, Bidadari, dan puluhan pulau lainnya yang membentuk ekosistem kepulauan khas kawasan ini. Pulau-pulau tersebut bukan sekadar gugusan geografis, tetapi juga rumah bagi salah satu satwa purba paling terkenal di dunia: komodo (*Varanus komodoensis*), yang menempatkan wilayah ini dalam peta konservasi global.

Secara geografis, letaknya sangat strategis. Di utara, Laut Flores membentang luas sebagai jalur pelayaran dan sumber perikanan. Di selatan, Laut Sawu yang lebih tenang menjadi perlintasan berbagai spesies laut migran, termasuk paus biru dan pari manta. Di timur, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Manggarai sebagai kabupaten induk, sedangkan di barat, hanya Selat Sape yang memisahkannya dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara astronomis, Manggarai Barat berada di antara 8°–9° Lintang Selatan dan 119°–120° Bujur Timur. Posisi ini menjadikannya gerbang paling barat Provinsi Nusa Tenggara Timur—pintu masuk dan keluar Flores bagian barat baik untuk perdagangan, pemerintahan, maupun interaksi budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Lanskap Manggarai Barat menghadirkan keragaman topografi yang menonjol. Lebih dari tiga perempat wilayahnya berada di atas ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Pesisirnya berupa dataran rendah yang subur, sementara daerah tengah dan selatan didominasi oleh lereng-lereng landai, perbukitan bergelombang, hingga pegunungan curam dengan kemiringan lebih dari 40 derajat. Variasi topografi ini memberikan dua keuntungan sekaligus: di satu sisi mendukung

berkembangnya pariwisata bahari kelas dunia, di sisi lain menyimpan potensi besar bagi pertanian lahan kering, perkebunan kopi dan kakao, serta sumber daya air pegunungan yang melimpah.⁵

Kondisi Sosial-Ekonomi dan Iklim

Iklim Manggarai Barat mencerminkan ciri khas kawasan Nusa Tenggara: kering lebih panjang dibandingkan basah. Dalam satu tahun, hanya sekitar empat bulan yang benar-benar dibasahi hujan, sementara delapan bulan sisanya relatif kering. Angin muson dari Asia dan Pasifik membawa uap air ke kawasan ini, tetapi kandungan kelembapan yang dibawanya banyak berkurang sebelum mencapai Flores. Udara panas di atas lautan yang luas “memakan” sebagian besar uap tersebut, sehingga curah hujan di Manggarai Barat lebih rendah dibanding wilayah lain di Indonesia bagian barat.

Rata-rata curah hujan tahunan berkisar di angka 1.500 milimeter. Kawasan pegunungan cenderung menerima hujan lebih banyak, sementara pesisir relatif kering. Pola musim semacam ini mendorong masyarakat mengatur ulang cara mereka mencari nafkah. Pada musim basah, mereka menggarap sawah dan ladang, menanam padi, jagung, serta berbagai tanaman perkebunan. Ketika musim kering tiba, arah usaha beralih ke laut, beternak, atau membuka peluang ekonomi lain yang sesuai dengan kondisi alam saat itu.⁶

Interaksi darat dan kepulauan yang melekat pada karakter Manggarai Barat membuat struktur ekonominya

⁵ Op. cit., Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

⁶ Ibid., Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

tidak pernah seragam. Aktivitas agraris di pedalaman bertemu dengan dinamika maritim di kawasan pesisir, dan dalam dua dekade terakhir, warna baru pun hadir: pariwisata kelas dunia yang menjadikan Labuan Bajo bukan hanya jantung pemerintahan, tetapi juga pintu masuk wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Inilah kombinasi unik yang menjadikan masyarakat Manggarai Barat terbiasa beradaptasi sebagai sebuah modal sosial penting bagi daerah muda yang sedang belajar mengelola otonomi sekaligus demokrasi.

Sejarah Perjuangan Pemekaran

Gagasan untuk memekarkan wilayah Manggarai Barat berawal jauh sebelum era reformasi bergulir. Pada dekade 1950-an, di tengah semangat membangun Indonesia yang baru merdeka, sejumlah tokoh lokal mulai menyadari bahwa pelayanan pemerintahan Kabupaten Manggarai belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat di bagian barat Flores. Wilayah pesisir dan kepulauan yang jauh dari pusat administrasi menghadapi hambatan jarak, keterbatasan infrastruktur, dan lambatnya pelayanan publik.⁷ Dari situlah lahir aspirasi agar pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat yang bukan semata demi kemudahan administrasi, melainkan juga untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.

Nama Lambertus Kape, seorang putra Kempo di Kecamatan Sano Nggoang, menjadi salah satu yang pertama mengangkat isu ini ke ranah nasional. Sebagai anggota Konstituante di Jakarta, ia memanfaatkan

⁷ Arsip Nasional Republik Indonesia, *Naskah Sumber Arsip Citra Daerah: Kabupaten Manggarai Barat dalam Arsip* (Jakarta: ANRI, 2018). Hlm. 6

posisinya untuk membawa suara daerahnya ke pusat kekuasaan, mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat di bagian barat Manggarai berbeda dan membutuhkan perhatian khusus. Upayanya membuka jalan bagi diskusi yang lebih terstruktur tentang kemungkinan pembentukan kabupaten baru di Flores bagian barat.

Perjuangan itu menemukan bentuk politik yang lebih jelas pada tahun 1963. Melalui Partai Katolik Subkomisariat Manggarai, aspirasi pemekaran mulai diperjuangkan secara formal. Langkah ini menandai pergeseran dari suara perorangan ke gerakan yang memiliki basis organisasi dan legitimasi politik. Walau demikian, dinamika politik nasional pada masa itu belum memberi ruang yang cukup besar untuk mewujudkan pemekaran daerah secara cepat.

Perubahan nyata baru datang dua dekade kemudian. Pada 11 November 1982⁸, pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-1355 yang menetapkan wilayah barat Manggarai sebagai Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat. Status ini bukan pemekaran penuh, melainkan semacam “ruang percobaan” administratif. Di satu sisi, keputusan ini mengakui kebutuhan pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, di sisi lain menjadi indikator awal bahwa wilayah ini tengah diukur kapasitas dan kelayakannya untuk menjadi daerah otonom.

Momentum besar datang pada penghujung abad ke-20. Gelombang reformasi 1998 mengubah lanskap politik Indonesia secara drastis. Prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang ditegaskan melalui Undang-Undang

⁸ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-1355 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat, 11 November 1982.

Nomor 22 Tahun 1999 (kemudian diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004) membuka peluang luas bagi daerah-daerah yang selama ini menyimpan aspirasi pemekaran. Manggarai Barat termasuk di antaranya. Dengan semangat baru, dilakukan pengkajian mendalam mengenai potensi wilayah, kemampuan fiskal, jumlah penduduk, dan kebutuhan pelayanan publik. Kajian ini membuktikan bahwa pemekaran bukan hanya keinginan masyarakat, melainkan juga kebutuhan logis untuk menjawab tantangan pembangunan di kawasan barat Flores.⁹



⁹ Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, "Sejarah Kabupaten Manggarai Barat," <https://manggarai Barat kab.go.id/halaman/sejarah-manggarai-barat.html> (diakses September 2025).

Pengesahan Kabupaten Manggarai Barat

Akhirnya, melalui Sidang Paripurna DPR RI pada 27 Januari 2003, aspirasi puluhan tahun itu mencapai puncaknya. Keputusan politik ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Undang-undang tersebut memuat tiga pertimbangan utama¹⁰:

1. Mendorong kemajuan Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai melalui pemerintahan yang lebih dekat dan efektif;
2. Memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial-budaya dan politik, luas wilayah, dan jumlah penduduk;
3. Mempercepat dan pemeratakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan, sekaligus memanfaatkan potensi daerah secara optimal.

Dengan disahkannya undang-undang ini, Manggarai Barat resmi berdiri sebagai daerah otonom baru, dengan Labuan Bajo sebagai ibu kota dan lima kecamatan awal: Macang Pacar, Kuwus, Lembor, Sano Nggoang, dan Komodo¹¹.

Perubahan ini bukan sekadar penataan ulang peta administrasi. Ia adalah jawaban atas aspirasi yang telah dipendam selama puluhan tahun untuk membuka jalan bagi pembangunan yang lebih dekat, cepat, dan merata. Dengan wilayah darat dan laut seluas hampir 9.500 km²

¹⁰ Op.Cit., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003, bagian menimbang

¹¹ Ibid., Pasal 3

serta posisi strategis sebagai gerbang barat Nusa Tenggara Timur, Manggarai Barat memasuki babak baru sejarahnya sebagai kabupaten muda yang dihadapkan pada satu tantangan besar: membuktikan bahwa otonomi bukan sekadar janji politik, melainkan peluang nyata untuk menghadirkan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

BAB III

MASA TRANSISI:

DARI PEJABAT BUPATI KE PANGGUNG DEMOKRASI

Kabupaten Manggarai Barat memang sudah resmi berdiri, tetapi pada awalnya ia hanyalah sebuah nama dalam lembaran undang-undang. Agar sebuah kabupaten benar-benar hidup, ia butuh pemerintahan yang berjalan, pelayanan publik yang nyata, dan arah pembangunan yang jelas. Semua itu tidak bisa menunggu pemilu, sebab infrastruktur kelembagaan belum terbentuk.

Karena itu, sebelum KPU dibentuk, pemerintah pusat menunjuk seorang pejabat bupati sementara, figur yang ditugaskan untuk “menyalakan mesin” pemerintahan daerah baru ini. Sosok itu adalah Drs. Fidelis Pranda, seorang birokrat berpengalaman dalam urusan pemerintahan daerah yang pada tanggal 1 September 2003,¹² pemerintah pusat secara resmi melantiknya sebagai Pejabat Bupati pertama, menandai langkah awal berdirinya pemerintahan daerah yang baru lahir tersebut.

Tugas yang diemban bukan main-main. Fidelis Pranda harus membangun fondasi dari nol yakni menata

¹² Kementerian Dalam Negeri RI, Dokumen Pelantikan Pejabat Bupati Manggarai Barat (arsip berita daerah, 1 September 2003). Perihal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat. Pasal 11 ayat (3) UU ini menyebutkan bahwa “Peresmian Kabupaten Manggarai Barat serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden paling lambat 2 (dua) bulan setelah Undang-Undang ini diundangkan.”

organisasi perangkat daerah, merancang anggaran perdana, menyiapkan layanan dasar, dan pada saat yang sama mempersiapkan pemilihan kepala daerah definitif dalam pengawasan menteri dalam negeri¹³. Semua langkah ini harus ditempuh dalam waktu singkat, di tengah harapan besar masyarakat yang sudah lama memperjuangkan pemekaran.

Penunjukan Pejabat Bupati ini menjadi semacam jembatan emas, penghubung antara keputusan politik di Jakarta dan kehidupan nyata masyarakat Manggarai Barat. Dari tangannya, kerangka awal pemerintahan lokal disusun. Maka, ketika saatnya tiba, kabupaten yang baru lahir ini siap menggelar pesta demokrasi pertamanya — menentukan arah masa depan melalui Pilkada langsung, sebuah lompatan besar dari status “kabupaten baru di atas kertas” menjadi daerah otonom yang dipimpin pilihan rakyatnya sendiri.

¹³ Ibid, Pasal 11 Ayat 5

BAB IV

MUNCULNYA PILKADA LANGSUNG: AWAL DEMOKRASI DI MANGGARAI BARAT

Saat Manggarai Barat masih sibuk menyusun fondasi pemerintahannya yang baru lahir, angin perubahan besar bertiup dari Jakarta. Sistem politik Indonesia sedang bergeser. Setelah puluhan tahun kepala daerah dipilih oleh DPRD, suara publik makin keras menuntut satu hal: biarkan rakyat sendiri yang menentukan pemimpinnya.

Desakan itu akhirnya diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Regulasi ini menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999, menjadi bagian dari reformasi besar tata kelola daerah di era desentralisasi. Disahkan pada 15 Oktober 2004, ia menjadi tonggak yang mengubah wajah demokrasi lokal di seluruh Indonesia. Untuk pertama kalinya, rakyat diberi hak memilih bupati, wali kota, dan gubernur secara langsung. Langkah berani yang menjanjikan keterlibatan publik yang lebih luas — tetapi juga menghadirkan tantangan baru: bagaimana memastikan proses pemilihan berlangsung jujur, adil, dan damai di setiap daerah, termasuk di wilayah-wilayah yang bahkan baru saja lahir.

Manggarai Barat termasuk di antaranya. Tahun 2005, gelombang pertama Pilkada langsung serentak digelar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Di tengah denyut demokrasi yang mulai terasa di tingkat lokal, kabupaten muda di ujung barat Flores ini bersiap menggelar pemilihan kepala daerah untuk pertama

kalinya sebagai sebuah momen yang akan menentukan arah langkahnya di tahun-tahun awal otonomi.

Bagi Manggarai Barat yang baru berusia dua tahun, Pilkada perdana bukan sekadar rutinitas politik. Ia adalah ujian sejarah, penegasan bahwa daerah ini bukan hanya hadir sebagai entitas administratif di atas kertas, tetapi siap berdiri tegak sebagai daerah otonom penuh yang lengkap dengan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri. Keharusan ini pun tertulis tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003:

“Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Manggarai Barat dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat enam bulan setelah peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.”¹⁴

Bunyi pasal itu bukan sekadar aturan formal, melainkan penegasan konstitusional bahwa kelahiran sebuah kabupaten harus segera diikuti oleh kepemimpinan definitif. Tujuannya jelas sejalan dengan prinsip desentralisasi yang diusung reformasi yakni memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika nasional.

Di balik kotak-kotak suara yang mulai disiapkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), di tengah logistik yang

¹⁴ Ibid., Pasal 10

harus diangkut melewati jalan tanah di perbukitan hingga menyeberang laut ke pulau-pulau kecil, tumbuh satu keyakinan bersama bahwa suara setiap warga, tak peduli sejauh apa ia tinggal dari Labuan Bajo tetap punya arti dalam menentukan masa depan kabupaten yang baru saja mereka lahirkan bersama.

BAB V

LINEAMENTA¹⁵ SEJARAH PILKADA MANGGARAI BARAT (2005–2024)

Dua dekade terakhir adalah saksi bagaimana Manggarai Barat belajar berdemokrasi. Dari Pilkada perdana pada 2005 yang menandai lahirnya kepemimpinan pilihan rakyat di sebuah kabupaten muda, hingga Pilkada kelima pada 2024 yang memperlihatkan kompetisi semakin seimbang dan matang, setiap periode mencatat bab penting dalam perjalanan politik daerah ini. Rangkaian Pilkada tersebut bukan sekadar pergantian nama bupati dan wakil bupati, melainkan juga refleksi dari perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergerak mulai dari konsolidasi pemerintahan awal, sengketa hukum yang menguji legitimasi, pergeseran generasi kepemimpinan, hingga bagaimana dinamika pariwisata nasional

¹⁵ Secara etimologis, istilah lineamenta berakar dari bahasa Latin. Bentuk tunggalnya adalah lineamentum, sementara bentuk jamaknya adalah lineamenta. Kata ini berasal dari akar kata linea yang berarti “garis”. Secara harfiah, lineamentum menunjuk pada “garis-garis” atau “sketsa” yang membentuk sesuatu, semacam goresan awal yang menandai wujud dasar dari sebuah bentuk. Dalam tradisi Latin klasik, lineamentum kerap digunakan untuk menggambarkan garis-garis yang membentuk wajah atau ciri-ciri seseorang (facial features). Namun, maknanya kemudian berkembang secara kiasan untuk menyebut “kerangka”, “rangka dasar”, atau “gambaran umum” dari sesuatu yang lebih besar dan kompleks. Perkembangan pemakaian kata ini semakin luas dalam konteks ilmiah dan gerejawi, misalnya dalam teks-teks filsafat atau sejarah Gereja Katolik. Dalam ranah tersebut, lineamenta dipakai untuk menyebut kerangka pemikiran awal, pokok-pokok garis besar, atau draf konseptual yang disiapkan sebelum menjadi dokumen final. Dengan demikian, penggunaan istilah Lineamenta Sejarah Pilkada Manggarai Barat dalam judul naskah ini secara etimologis bermakna sebagai gambaran umum atau kerangka awal mengenai sejarah Pilkada Manggarai Barat. Judul ini menunjukkan bahwa naskah tersebut bukan uraian yang sepenuhnya final, melainkan sebuah peta besar yang merangkum pokok-pokok penting perjalanan demokrasi daerah tersebut.

memengaruhi strategi politik lokal. *Linementa* (gambaran umum) ini merangkai kisah Pilkada Manggarai Barat dari 2005 hingga 2024, bukan hanya sebagai dokumentasi, tetapi sebagai bahan belajar: bagaimana demokrasi bekerja di lapangan, di sebuah daerah yang lahir dari aspirasi panjang dan kini menjadi salah satu titik strategis Indonesia timur.

Pilkada Pertama (2005): *Menentukan Nahkoda Perdana*

Dua tahun setelah resmi berdiri sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, Kabupaten Manggarai Barat menghadapi ujian pertamanya yakni memilih pemimpin melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.¹⁶ Momen ini bukan sekadar agenda politik rutin, melainkan tonggak sejarah dalam perjalanan demokrasi lokal Flores bagian barat.

Semacam oase di tengah padang gurun. Selama puluhan tahun, masyarakat di Labuan Bajo, Lembor, Komodo, Macang Pacar, hingga Sano Nggoang, berada dalam naungan Kabupaten Manggarai¹⁷. Aspirasi pemekaran

¹⁶ Menjadi salah satu dari 6 Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT yang pada ketika itu menggelar Pilkada Serentak, lih. Bernadus Barat Daya, Kicauan Tak Terdengar, Penggalan Memoar Seorang Aktivist, Penerbit WR: 2016., hlm.34.

¹⁷ Pada tahun 2002, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun sebuah dokumen berjudul “Profil Daerah Kabupaten Manggarai sebelum Pemekaran”. Dokumen ini menjadi salah satu bahan dasar kajian dalam proses pemekaran wilayah yang kemudian melahirkan Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur. Profil tersebut memuat gambaran menyeluruh tentang kondisi geografis, demografi, ekonomi, sosial, dan infrastruktur Kabupaten Manggarai sebelum dipecah. Data yang dihimpun mencakup sebaran penduduk, potensi sumber daya alam, tingkat pelayanan dasar, dan kapasitas kelembagaan daerah. Analisis tersebut dipakai untuk menilai kelayakan daerah otonom baru berdasarkan indikator kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, dan pertimbangan lainnya sesuai dengan pedoman dari pemerintah pusat. Hasil kajian dalam profil tersebut menjadi bahan pendukung

telah lama dibicarakan dalam forum adat, pertemuan tokoh agama, hingga diskusi di kalangan birokrasi, namun baru terealisasi di awal dekade 2000-an, seiring gelombang reformasi dan desentralisasi yang memberi ruang daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri¹⁸.

Pilkada 2005 pun hadir sebagai kesempatan pertama bagi warga Manggarai Barat untuk menentukan arah pemerintahan mereka sebagai sebuah hak politik yang sebelumnya hanya menjadi wacana panjang.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kala itu masih sibuk membangun kelembagaan dan infrastruktur pemilu¹⁹. Tantangan logistik tak bisa dianggap sepele. Wilayah Manggarai Barat bukan hanya mencakup dataran Flores bagian barat, tetapi juga gugusan pulau-pulau kecil dan perairan luas, termasuk Taman Nasional Komodo yang sudah mendunia.²⁰ Distribusi kotak dan surat suara dilakukan melalui jalur

dalam penyusunan naskah akademik dan usulan pembentukan daerah otonom baru ke DPR dan Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat.

¹⁸ Periode 2001–2003, Bappeda Provinsi NTT dan Tim Penataan Daerah (TPD) mempersiapkan kajian mendalam untuk mendukung pemekaran wilayah. Meski dokumen “Laporan Profil Daerah sebelum Pemekaran” tidak tersedia secara online, kerangka pertimbangan perubahan administratif dan pembangunan daerah sudah tercermin dalam Perda Pola Dasar Pembangunan 2001–2004 (Perda NTT No. 8/2001), serta Penjelasan UU 8/2003 yang menyebut indikator seperti potensi daerah, demografi, dan sosial-politik sebagai dasar pembentukan Kabupaten Manggarai Barat.

¹⁹ Arsip KPU RI: Keputusan KPU tentang Pembentukan KPU Kabupaten Manggarai Barat, 2004, lih juga KPU Kabupaten Manggarai Barat, “Sejarah KPU Manggarai Barat,” diakses dari <https://kab-manggarai Barat.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu-manggrai-barat>, diakses pada 7 September 2025.

²⁰ Profil Taman Nasional Komodo, Kementerian Kehutanan, 2004, diakses dari <https://tnkomodo.ksdae.kehutan an.go.id/> pada September 2025

darat ke Lembor dan Macang Pacar, sementara ke pulau-pulau seperti Rinca, Papagarang, dan Komodo, petugas harus menggunakan perahu motor, berpacu dengan cuaca yang kerap berubah cepat, angin barat, dan gelombang yang bisa kapan saja menghentikan perjalanan.

Meski infrastruktur terbatas, semangat demokrasi warga sangat tinggi. Dari 106.718 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (51.687 laki-laki dan 54.856 perempuan)²¹, tercatat 88,8% hadir di 485 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di lima kecamatan pada hari pemungutan suara yang digelar pada 27 Juni 2005.

Kecamatan	Jumlah Pemilih (DPT)	Jumlah TPS
Komodo	26.126	102
Sano Nggoang	13.268	92
Kuwus	20.477	99
Macang Pacar	14.350	55
Lembor	32.497	137
Total	106.718	485

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin antusiasme warga yang melihat Pilkada pertama sebagai kesempatan menentukan masa depan daerahnya sendiri.

²¹ Laporan Akhir Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat 2005, KPU Kabupaten Manggarai Barat, 2005.

Tiga pasangan calon tampil di kontestasi perdana ini:

No. Pasangan Calon	Partai Pengusung
1 Ir. Ferdinandus Pantas, M.Si dan Drs. Tobias Wanus	Koalisi: Golkar, PKPI, Partai Merdeka, PKPB, PPP, PPD
2 Drs. Wilfridus Fidelis Pranda dan Drs. Agustinus Ch. Dula	Koalisi: Partai Demokrat, PDK, PNBK, PKS, PBB, PDS, PKB
3 Drs. Yohanes Suhandi, M.Si dan Drs. Onesimus Jaman	PDI Perjuangan

Namun bukan tanpa masalah. Pilkada Manggarai Barat pertama ini juga diwarnai aksi demonstrasi dan penolakan. Misalnya pada tahap pencalonan, Ir. Theodorus Suhardi, M.Si, salah satu bakal calon bupati melakukan protes kepada KPU Kabupaten Manggarai Barat karena dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan, lantaran tidak melakukan perbaikan terhadap beberapa berkas pencalonan yang diminta oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk diperbaiki, sampai pada batas waktu yang ditentukan, yakni pada saat rapat pleno penetapan pasangan calon peserta pemilihan pada ketika itu²²

Kampanye dijalankan dalam suasana yang jauh berbeda dibandingkan era digital kini. Tanpa media sosial, tanpa mesin propaganda daring, tanpa baliho raksasa di persimpangan kota, para kandidat bergerak dari desa ke

²² Bernadus Barat Daya, Op.Cit., hlm. 36

desa, pulau ke pulau, melakukan tatap muka, dialog terbuka di balai desa, dan pendekatan kultural khas Manggarai. Musik tradisional, orasi politik bercampur humor, hingga ritual adat kerap mewarnai setiap pertemuan, menciptakan dinamika politik yang akrab dan membumi.²³

Hari pemungutan suara, Senin 27 Juni 2005, menjadi momentum sejarah. Rekapitulasi resmi KPU Kabupaten Manggarai Barat mencatat:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
Wilfridus Fidelis Pranda – Agustinus Ch. Dula	50.032	53,75%
Ferdinandus Pantas – Tobias Wanus	26.682	28,67%
Yohanes Suhandi – Onesimus Jaman	16.368	17,58%

Pasangan Wilfridus Fidelis Pranda – Agustinus Ch. Dula memperoleh dukungan mayoritas yang meyakinkan, unggul jauh di atas dua pasangan lainnya di lima Kecamatan.

Kec.	Pantas/ Wanus	Pranda/ Dula	Sehadi/ Jaman
Komodo	5.035	10.844	6.002

²³ Wawancara dengan Yohanes Parang, tokoh adat Manggarai Barat, oleh wartawan *Harian Pos Kupang*, edisi 5 Juli 2005, hlm. 4.

Kec.	Pantas/ Wanus	Pranda/ Dula	Sehadi/ Jaman
Sano Nggoang	1.293	4.528	5.924
Kuwus	9.602	7.278	1.872
Macang Pacar	3.466	7.011	1.827
Lembor	7.286	20.371	743
Jumlah	26.682	50.032	16.368

Kemenangan ini menandai transisi dari kepemimpinan pejabat bupati yang ditunjuk pusat menuju kepemimpinan definitif hasil pilihan rakyat.

Namun, sengketa pun muncul. Dua pasangan calon yang merasa dirugikan dalam kontestasi mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung yang didelegasikan kepada Pengadilan Tinggi Negeri Kupang.²⁴ Namun gugatan tersebut ditolak dan menyatakan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tetap berlaku.²⁵ Putusan MA

²⁴ Sebelum adanya perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai hasil penghitungan suara Pilkada, maka sengketa tersebut diajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun, pengajuan itu tidak dilakukan secara langsung, melainkan harus disampaikan melalui Pengadilan Tinggi di wilayah hukum yang bersangkutan, yang kemudian meneruskan berkas perkara tersebut kepada Mahkamah Agung. Untuk menindaklanjuti amanat undang-undang tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. Perma ini memberikan dasar hukum teknis mengenai bagaimana perkara sengketa hasil Pilkada diperiksa, diputus, dan dicatat dalam administrasi peradilan.

²⁵ Bernadus Barat Daya, Op.Cit., hal 38

RI Nomor 41 P/Kada/2005 pada akhirnya menguatkan kemenangan pasangan Drs. Wilfridus Fidelis Pranda – Drs. Agustinus Ch. Dula sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2005–2010.

Pelantikan mereka pada akhir Agustus 2005²⁶ bukan sekadar seremoni administratif, tetapi simbol legitimasi demokrasi. Fidelis Pranda menjadi Bupati definitif pertama Kabupaten Manggarai Barat, sementara Agustinus Dula, yang kelak menjadi figur sentral politik Mabar selama satu dekade berikutnya, memulai langkahnya dari posisi Wakil Bupati pertama.

Keberhasilan Pilkada 2005 memberi keyakinan bahwa Manggarai Barat mampu mengelola demokrasi dalam konteks geografis dan sosial yang kompleks. Pilkada ini menjadi pondasi politik, menciptakan tradisi pemilu langsung yang kelak berkembang semakin kompetitif, semakin matang, dan semakin menentukan arah perjalanan kabupaten di gerbang barat Nusa Tenggara Timur.

Pilkada Kedua (2010): *Politik Makin Ramai, Hukum Menguji*

Lima tahun sejak pemilihan bupati pertama digelar, Manggarai Barat tidak lagi sekadar “daerah pemekaran muda” yang penuh harapan. Dalam waktu singkat, kabupaten di ujung barat Flores ini mulai menunjukkan potensinya. Labuan Bajo, yang dulu hanyalah kota pelabuhan kecil, perlahan berubah wajah menjadi destinasi wisata unggulan. Jalan-jalan diperbaiki,

²⁶ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-XXX/2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

pembangunan mulai menjangkau wilayah pedalaman dan kepulauan, serta aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, didorong oleh geliat pariwisata, perdagangan, dan sektor jasa.

Di balik kemajuan itu, konstelasi politik lokal ikut bergeser. Lima tahun pemerintahan pertama memberi pengalaman berharga, tetapi juga membuka ruang bagi evaluasi, kritik, dan ambisi baru. Partai-partai politik, yang pada awalnya masih sibuk mencari pijakan di daerah baru ini, kini sudah punya basis dukungan yang lebih jelas. Tokoh-tokoh lokal yang dulu sekadar figur pendukung mulai melihat peluang lebih besar. Kursi bupati tidak lagi sekadar simbol administrasi, tetapi posisi strategis: pusat kendali arah pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan distribusi kekuasaan.

Atmosfer inilah yang mewarnai Pilkada Manggarai Barat tahun 2010. Berbeda dengan 2005, ketika kontestasi masih sederhana dan didominasi figur-figur awal pembentukan kabupaten, kali ini panggung politik penuh sesak. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menetapkan delapan pasangan calon. Jumlah ini bukan hanya terbanyak sepanjang sejarah Pilkada daerah ini, tetapi juga mencerminkan “ledakan” partisipasi politik lokal — semua kekuatan ingin mencoba peruntungannya.

Berikut daftar pasangan calon yang maju dalam Pilkada Manggarai Barat tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 40/Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2010 tentang peserta Pilkada Manggarai Barat 2010 yakni²⁷:

²⁷ Sebagian besar isi tulisan pada bagian ini, Pilkada Pertama (2010) di akses dari Laporan Tahapan Pilkada Manggarai Barat 2010

No.	Nama Pasangan Calon	Julukan (Paket)	Dukungan/ Pengusung
1	Ir. Yohanes W. Wempi Hapan, M.Sc. dan Ir. Monaldus Nadjib	Panji	PKPB, PPI, PPIB, PKIB
2	Drs. W. Fidelis Pranda dan Vinsensius Pata, SH	Fiva	PDIP, Hanura, PKPI, PDK, PSI
3	Mateus Hamsi, S.Sos dan Thedorrus Hagur	Mashur	Golkar, Partai Karya Perjuangan
4	Drs. Yosf Ardis dan Bernadus Barat Daya, SH, MH	Yes	PMB, PBR
5	Drs. Saferinus Dagun dan Fransiskus Sukamaniara	Sar	Perseorangan
6	Paul Serak Baut, M.Si dan Drs. Petrus Malada, MM	Palma	Perseorangan
7	Drs. Antony Bagul Dagur, M.Si dan H. Abdul Asis, S.Sos	Damai	PKS, PDS, PBB
8	Drs. Agustinus Ch. Dula dan Drs. Maximus Gasa, M.Si	Gusti	PAN, PPPDI, Demokrat, PKNU, Partai Pelopor

Fragmentasi ini menunjukkan politik yang semakin cair. Tidak ada satu kekuatan dominan; aliansi partai-partai nasional terdistribusi, figur-figur berpengaruh hadir dari berbagai latar belakang diantaranya birokrasi, politik,

jaringan adat, bahkan dukungan komunitas keagamaan. Manggarai Barat menjadi ajang pertarungan yang benar-benar kompetitif, di mana strategi, jaringan, dan kemampuan merangkul dukungan akar rumput menjadi penentu.

Di tengah delapan pasangan calon itu, satu nama menarik perhatian publik: Agustinus Ch. Dula, wakil bupati periode pertama (2005–2010). Pengalamannya lima tahun di pemerintahan daerah hasil pemekaran menjadi modal kuat. Dula memilih Maximus Gasa sebagai pasangan, kombinasi yang dianggap membawa “dua mesin sekaligus” yakni legitimasi pemerintahan lama dan kekuatan politik baru.

Sementara itu, bupati pertama, Fidelis Pranda, tidak tinggal diam. Ia kembali maju, kali ini berpasangan dengan Pata Vinsensius, menjadikan kontestasi ini bukan hanya tentang program dan jaringan, tetapi juga tentang duel figur lama dalam konfigurasi baru.

Kampanye berlangsung jauh lebih intens daripada lima tahun sebelumnya. Panggung kampanye tidak lagi sederhana; kini diwarnai orasi besar, janji pembangunan, serta manuver politik yang melibatkan kelompok-kelompok kepentingan yang lebih beragam. Isu pemerataan pembangunan antara daratan dan kepulauan menjadi topik panas. Begitu pula soal infrastruktur, peluang kerja, pariwisata, dan tata kelola pemerintahan yang dianggap perlu lebih transparan dan responsif.

Hari pemungutan suara tiba. Pemungutan suara oleh 127.677 pemilih dalam DPT²⁸ dilakukan di 500 Tempat

²⁸ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41a/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tentang Perubahan Pertama Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih

Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di tujuh kecamatan digelar pada 3 Juni 2010 dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 89 %.

Kecamatan	Jumlah Pemilih (DPT)	Jumlah Desa	Jumlah TPS
Komodo	25.563	16	77
Sano	14.568	24	92
Nggoang			
Kuwus	22.348	27	96
Macang	16.588	13	58
Pacar			
Lembor	28.171	21	103
Boleng	9.967	9	34
Welak	10.170	11	40
TOTAL	127.384	121	500

Secara teknis, KPU menghadapi tantangan serupa seperti 2005: wilayah kepulauan, logistik yang harus diangkut lewat darat dan laut, cuaca yang tidak selalu bersahabat. Namun, pengalaman lima tahun sebelumnya membuat penyelenggaraan lebih rapi, meskipun tensi politik lebih tinggi dari sebelumnya.

Hasil rekapitulasi yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 46/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 pada tanggal 10 Juni 2010 menunjukkan pasangan Agustinus Ch. Dula – Maximus Gasa (GUSTI) keluar sebagai pemenang dengan perolehan 34.972 suara. Posisi kedua ditempati pasangan Fidelis

Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010 tanggal 4 Mei 2010

Pranda dan Pata Vinsensius (FIVA) dengan 29.401 suara, sementara enam pasangan lain tersebar jauh di bawah keduanya.

Selisih sekitar 5.500 suara memperlihatkan kompetisi yang ketat di dua poros utama. Kontestasi politik di Manggarai Barat kini bukan lagi soal siapa yang paling dikenal, tetapi siapa yang paling efektif membangun koalisi dan mengelola dukungan di wilayah yang sangat beragam.

No	Pasangan Calon (Nama/Julukan)	Suara Sah
1	PANJI (Ir. Yohanes W. W. Hapan – Ir. Monaldus Nadjib)	3.225
2	FIVA (Drs. W. Fidelis Pranda – Pata Vinsensius)	29.401
3	MASHUR (Matheus Hamsi – Theodore Sagur)	12.968
4	YES (Drs. Yosef Ardis – Bernandus Barat Daya)	11.177
5	SAR (Drs. Saferinus Dagun – Fransiskus Sukmaniera)	2.435
6	PALMA (Paul Serak Baut – Drs. Malada Peterus)	3.243
7	DAMAI (Drs. Antony Bagul Dagur – H. Abdul Asis)	14.863
8	GUSTI (Drs. Agustinus Ch. Dula – Drs. Gaza Maximus)	34.972
Total Suara Sah		112.284

Namun, kemenangan ini tidak serta-merta menutup cerita. Tiga pasangan calon yang kalah dan/atau merasa dirugikan yakni Pasangan calon DRS. W. Fidelis Pranda dan Pata Vinsensius, SH., MM (FIVA), Pasangan calon

DRS. Ardis Yosef dan Bernandus Barat Daya, S.H., M.H (YES) dan Pasangan calon Antony Bagul Dagur, M.Si dan H. Abdul Asis, S.Sos (DAMAI) mengajukan gugatan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sengketa ini menyoroti persoalan administrasi dan tuduhan pelanggaran yang dianggap memengaruhi hasil. MK kemudian memutuskan menolak permohonan para penggugat dan menguatkan kemenangan pasangan Dula-Gasa sebagaimana tertuang dalam amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Manggarai Barat Tahun 2010.²⁹ Pasangan ini pun dilantik pada 9 Agustus 2010 melalui SK Menteri Dalam Negeri, menandai awal periode pemerintahan kedua Manggarai Barat.

Sengketa hukum tidak berhenti di Mahkamah Konstitusi. Proses politik selalu menyimpan kejutan. Pasca Pilkada, sengketa hukum pun muncul. Sengketa kepemimpinan daerah Manggarai Barat pasca Pilkada 2010 menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana jalur hukum dan jalur politik kerap berjalan tidak seirama.

Pada awalnya, paket Fiva menggugat keabsahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.53-461 Tahun 2010 (tentang pengesahan pengangkatan Bupati Manggarai Barat) dan Nomor 132.53-462 Tahun 2010 (tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Manggarai Barat), keduanya tertanggal 9 Agustus 2010. Gugatan ini diajukan ke PTUN

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Manggarai Barat Tahun 2010

Jakarta, dan pada 17 Maret 2011 majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan batal kedua SK Mendagri tersebut.
3. Mewajibkan Mendagri mencabutnya.
4. Menolak gugatan selebihnya.
5. Menghukum Mendagri membayar biaya perkara sebesar Rp 94.000.

Dengan demikian, secara hukum paket Fiva dinyatakan menang, sementara Mendagri sebagai tergugat dinyatakan kalah. Putusan ini bahkan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Akan tetapi, meskipun penggugat telah tiga kali mengajukan permohonan eksekusi, pada kenyataannya putusan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Semua berakhir dengan status non-eksekutabel, sementara pasangan kepala daerah yang sudah dilantik tetap melanjutkan roda pemerintahan.

Hampir dua tahun setelah pelantikan, tepatnya pada 7 Mei 2012, Mahkamah Agung (MA) kembali mengeluarkan putusan mengejutkan, yakni Putusan No. 346 K/TUN/2011 yang membatalkan SK Mendagri No. 131.53-462 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan Agustinus Ch. Dula – Maximus Gasa sebagai Kepala Daerah Manggarai Barat. Putusan ini dijatuhkan setelah putusan Pengadilan Tinggi Kupang tertanggal 1 November 2010 dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Secara yuridis, keputusan MA tersebut jelas menggoyahkan legitimasi pemerintahan yang sudah berjalan hampir separuh periode. Bahkan, Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, seharusnya mencopot pasangan

Dula–Gasa paling lambat dalam waktu 60 hari sejak putusan inkracht, yakni sekitar awal Januari 2012.³⁰

Namun, realitas politik dan pemerintahan menunjukkan hal berbeda. Tidak ada penunjukan pejabat sementara, tidak ada kekosongan kekuasaan, dan tidak ada krisis nyata di lapangan. Pasangan Dula–Gasa tetap menjalankan pemerintahan hingga masa jabatannya berakhir pada 2015, meskipun secara hukum dasar pengangkatan mereka sudah dibatalkan pengadilan.

Peristiwa ini menjadi salah satu episode paling unik dalam sejarah demokrasi lokal di Nusa Tenggara Timur. Para pengamat menyebutnya sebagai bentuk “anomali transisi”, yakni sebuah kondisi ketika logika hukum dan logika politik tidak sejalan, namun keputusan politik diambil dengan mempertimbangkan stabilitas daerah sebagai prioritas utama.

Masyarakat sempat bingung, tetapi konflik tidak meluas. Pemerintahan tetap berjalan, pembangunan tidak berhenti, dan demokrasi lokal diuji dalam makna yang lebih dalam: bagaimana mengelola ketidakpastian tanpa meruntuhkan fondasi yang sedang dibangun.

Dari Pilkada 2010, Manggarai Barat belajar bahwa demokrasi bukan sekadar soal menang-kalah di bilik suara. Demokrasi juga tentang kemampuan daerah bertahan menghadapi turbulensi hukum, menjaga agar pemerintahan tidak lumpuh, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan meskipun badai politik mengguncang di atasnya.

³⁰ Bernadus Barat Daya, Op. Cit., hlm. 300-301

Pilkada Ketiga (2015): *Antara Kontinuitas, Sengketa, dan Jejak Sejarah Wakil Bupati Perempuan*

Tahun 2015 menjadi tonggak baru dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia. Pemerintah pusat, DPR, dan KPU akhirnya sepakat mengubah cara rakyat memilih pemimpin daerah. Tidak lagi dilakukan sendiri-sendiri dengan jadwal yang berbeda-beda, tetapi digelar secara serentak di seluruh negeri.

Tujuannya jelas: menyelaraskan masa jabatan kepala daerah, memangkas biaya politik yang terus membengkak, dan memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Bagi Manggarai Barat, kebijakan baru ini menghadirkan sebuah babak baru. Pesta demokrasi ketiga di kabupaten ini harus digelar bersamaan dengan ratusan daerah lain di seluruh Indonesia. Tidak ada lagi “jadwal khusus” mengikuti siklus pemekaran. Segala dinamika lokal kini diikat dalam kalender nasional.³¹

Pada 9 Desember 2015, seluruh Indonesia bersiap menyambut gelombang Pilkada serentak pertama dalam sejarah. Manggarai Barat, yang kala itu berusia 12 tahun, sudah jauh berbeda dari satu dekade sebelumnya. Ia bukan lagi daerah “pemekaran muda” yang masih mencari arah, tetapi sebuah kabupaten yang mulai percaya diri, dengan pengalaman politik yang sudah ditempa oleh dua kali kontestasi dan beberapa kali sengketa. Para pemilihnya pun semakin kritis. Bagi sebagian warga, Pilkada kali ini bukan sekadar tentang

³¹ Sebagian besar isi tulisan pada bagian ini, Pilkada Pertama (2015) di akses dari Laporan Tahapan Pilkada Manggarai Barat 2015

memilih bupati dan wakil bupati, tetapi tentang mengukur kedewasaan demokrasi lokal tentang sejauh mana Manggarai Barat mampu lepas dari bayang-bayang masa transisi dan berdiri di atas pijakan yang lebih matang.

Di tengah arena yang makin terbuka itu, satu nama lama kembali muncul ke permukaan yakni Agustinus Ch. Dula. Selama lima tahun terakhir ia memimpin kabupaten ini, bukan tanpa badai. Polemik hukum sempat mengguncang, bahkan sempat ada putusan pengadilan yang secara formal membatalkan SK pengangkatannya. Namun Dula tetap berdiri, memimpin pemerintahan hingga akhir periode, dan di mata banyak orang, ia adalah simbol kontinuitas di tengah turbulensi politik.

Kali ini, Dula tidak maju sendirian. Ia memilih strategi baru menggandeng Drh. Maria Geong, Ph.D seorang birokrat senior, akademisi, dan figur perempuan yang dikenal bersih, cerdas, dan teknokratis. Keputusan ini bukan hanya soal memperkuat dukungan politik, tetapi juga menghadirkan pesan simbolik yang kuat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Manggarai Barat, seorang perempuan diposisikan sebagai calon wakil bupati. Kehadiran Maria membawa angin segar sebagai sinyal tentang kesetaraan, profesionalisme, dan keberanian membuka ruang representasi gender di puncak pemerintahan daerah.

Persaingan kali ini tidak sesak seperti Pilkada 2010 yang diikuti delapan pasangan calon. Namun, dengan lima pasangan yang resmi ditetapkan KPU, tensi politik tetap tinggi. Kandidat yang bertarung datang dari berbagai latar belakang birokrat, politisi, pengusaha, hingga figur lokal yang mengandalkan dukungan jaringan sosial dan adat.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-018.434062/2015, lima pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung/ Jalur Pencalonan
1	Drs. Gasa Maximus, M.Si & H. Abdul Azis, M.Pd.i	Partai GERINDRA, PKS & PBB
2	Drs. Agustinus Ch. Dula & Dra. Maria Geong, Ph.D	NASDEM, PDIP, PAN, PKPI
3	Mateus Hamsi, S.Sos & Drs. Paul Serak Baut, M.Si	Partai GOLKAR & PPP
4	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si & Yohanes D. Hapan	Jalur Perseorangan (dukungan 24.856 jiwa)
5	Tobias Wanus & Fransiskus Sukmaniara	PARTAI DEMOKRAT, PKB

Namun sebelum peserta pemilihan ditetapkan, suasana politik sempat memanaskan ketika bakal pasangan calon Fidelis Pranda dan Benyamin Paju yang juga meniatkan diri mengikuti kontestasi dibatalkan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat.

Kisahnya. Pada 28 Juli 2015, pasangan ini mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi politik tersebut dengan mengantongi dukungan beberapa partai politik, termasuk PKB, PKPI, dan Hanura. Namun, proses pendaftaran mereka tidak berjalan mulus. KPU Kabupaten Manggarai Barat menolak pendaftaran mereka karena surat keputusan dukungan partai yang diajukan ternyata sudah dipakai oleh pasangan calon lain. Situasi ini

memunculkan ketegangan dan menimbulkan protes dari Pranda-Paju, yang merasa bahwa keputusan KPU tidak adil dan tidak transparan.

Merasa hak mereka terhalang, Pranda-Paju kemudian mengajukan aduan resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka menuding KPU Manggarai Barat telah melakukan pelanggaran prosedur, termasuk menunda proses verifikasi berkas dan tidak mencatat beberapa tahapan dalam berita acara resmi. Sidang DKPP kemudian digelar untuk menelaah dugaan pelanggaran tersebut. Dalam prosesnya, DKPP menyoroti bahwa KPUD menerima berkas pendaftaran Pranda-Paju setelah batas waktu yang ditentukan dan proses verifikasi berjalan tidak transparan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pasangan calon tersebut.

Setelah mengajukan protes terhadap KPU Manggarai Barat terkait penolakan pendaftaran mereka dalam Pilkada 2015, pasangan calon Fidelis Pranda dan Benyamin Paju membawa kasus tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Mereka menilai KPU telah melanggar prosedur, menerima pendaftaran di luar jadwal resmi, serta menunda atau mengabaikan tahapan verifikasi tanpa alasan yang jelas.

Sidang DKPP digelar untuk meneliti dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Hasilnya, DKPP memutuskan bahwa KPU Manggarai Barat terbukti melanggar prinsip profesionalitas dan kemandirian. Penerimaan berkas pasangan Pranda-Paju yang dilakukan di luar jadwal yang sah dianggap tidak berdasar dan merugikan pihak calon.

Selain itu, DKPP menyoroti kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Manggarai Barat yang tidak konsisten.

Meskipun awalnya mengeluarkan rekomendasi untuk meneliti keabsahan dokumen Pranda–Paju, Panwaslih kemudian menolak sengketa yang sama tanpa penjelasan, sehingga dianggap tidak menjalankan tugasnya dengan kepastian hukum dan kesungguhan.

Sebagai akibatnya, DKPP menjatuhkan peringatan kepada seluruh penyelenggara terkait, termasuk ketua dan anggota KPU serta anggota Panwaslih Manggarai Barat.³²

Meski demikian, proses penyelenggaraan Pilkada tetap berlanjut. Salah satu tahapan penting, yaitu penetapan nomor urut pasangan calon, tetap dilaksanakan.

Ketetapan ini dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Kab/018.434062/PILBUP/2015:

Nomor Urut Peserta	Pasangan Calon
Pasangan Calon Nomor Urut 1	Drs. Agustinus Ch. Dula dan Dra. Maria Geong, Ph.D
Pasangan Calon Nomor Urut 2	Tobias Wanus dan Fransiskus Sukmaniara
Pasangan Calon Nomor Urut 3	Mateus Hamsi, S.Sos dan Drs. Paul Serak Baut, M.Si
Pasangan Calon Nomor Urut 4	Drs. Gasa Maximus, M.Si dan H. Abdul Azis, M.Pd.I
Pasangan Calon Nomor Urut 5	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Yohanes D. Hapan

Di satu sisi, ada kubu petahana, yakni wakil bupati yang menjadi calon bupati nomor urut 1, yang ingin menjaga

³² DKPP, *KPU dan Panwaslih Manggarai Barat Diperingatkan*, diakses dari <https://dkpp.go.id/kpu-dan-panwaslih-manggarai-barat-diperingatkan>

kesinambungan pembangunan, menekankan stabilitas, dan memanfaatkan modal kepercayaan publik yang sudah dibangun. Di sisi lain, hadir faksi-faksi oposisi yang mencoba menawarkan alternatif, menggugat dominasi lama, dan mengangkat isu pemerataan pembangunan, pengelolaan pariwisata, hingga ketimpangan antara wilayah darat dan kepulauan.

Kampanye pun berlangsung lebih modern dibanding satu dekade sebelumnya. Media massa lokal, baliho di persimpangan jalan, radio, bahkan awal-awal penggunaan media sosial mulai memainkan peran penting. Dialog publik semakin terbuka. Masyarakat tak lagi pasif, mereka berani membandingkan visi, memeriksa rekam jejak, dan menguji janji-janji kandidat. Politik lokal kini bergerak menuju fase baru: bukan lagi soal siapa yang paling dikenal, tetapi siapa yang dianggap paling mampu mengelola kompleksitas Manggarai Barat yang kian berkembang dan disorot nasional berkat pariwisatanya.

Hari pemungutan suara tiba, 9 Desember 2015. Dari Labuan Bajo hingga pulau-pulau di gugus Komodo, dari Lembor hingga Sano Nggoang, warga datang berbondong-bondong ke TPS. Sebanyak 493 TPS disiapkan di 10 kecamatan, melayani 156.460 pemilih terdaftar dalam DPT. Namun, partisipasi menurun jika dibandingkan Pilkada sebelumnya, yakni hanya mencapai 73,7 %.

No	Kecamatan	Jumlah Pemilih	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS
1	Boleng	12.730	11	36
2	Komodo	33.051	19	77
3	Kuwus	14.309	22	52
4	Lembor	21.205	15	52

5	Lembor Selatan	14.311	15	43
6	Macang Pacar	18.716	26	58
7	Mbelling	8.205	15	45
8	Ndoso	11.755	15	40
9	Sano Nggoang	8.863	15	49
10	Welak	13.315	16	41
10 Kecamatan		156.460	169	493

Hasil akhirnya diumumkan dalam penetapan pada 17 Desember 2015 pukul 17.00 Wita. Rekapitulasi resmi KPU menetapkan pasangan Agustinus Ch. Dula – Maria Geong sebagai pemenang, unggul di antara lima kandidat, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 42/Kpts/KPU-Kab-018.434062/PILBUP/2015 dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. Agustinus Ch. Dula dan Dr. Maria Geong, Ph.D	29.358
2	Drs. Tobias Wanus dan Fransiskus Sukmaniara	15.250
3	Mateus Hamsi, S.Sos dan Paulus Serak Baut, M.Si	23.456
4	Drs. Gasa Maximus, M.Si dan H. Abdul Azis, M.Pd.i	22.554
5	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Yohanes Dionisius Hapan	24.745

Hasil pemungutan suara Pilkada Manggarai Barat tahun 2015 menunjukkan bahwa pasangan Drs. Agustinus Ch. Dula dan Dr. Maria Geong, Ph.D memperoleh suara

terbanyak dengan 29.358 suara. Pasangan ini unggul atas Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Yohanes D. Hapan yang berada di posisi kedua dengan 24.745 suara. Di bawahnya, Mateus Hamsi, S.Sos dan Paulus Serak Baut, M.Si meraih 23.456 suara, disusul Drs. Gasa Maximus, M.Si dan H. Abdul Azis, M.Pd.i dengan 22.554 suara. Sementara itu, Drs. Tobias Wanus dan Fransiskus Sukmaniera memperoleh 15.250 suara dan menempati posisi kelima.

Kemenangan ini menorehkan dua catatan sejarah sekaligus yakni Dula menjadi bupati pertama yang berhasil menjabat dua periode berturut-turut, dan Maria Geong tercatat sebagai wakil bupati perempuan pertama dalam sejarah Manggarai Barat.

Namun, cerita Pilkada ini belum berakhir di kotak suara. Ketatnya persaingan dan insiden di lapangan (termasuk pembakaran 32 dari 41 kotak suara di Kecamatan Ndosu) menyeret hasil Pilkada ke ranah hukum. Tiga pasangan calon menggugat ke Mahkamah Konstitusi, mempertanyakan keabsahan rekapitulasi ulang dan legitimasi hasil pemilihan.

Sengketa ini menjadi salah satu ujian hukum paling serius dalam sejarah politik Manggarai Barat. MK akhirnya membacakan putusannya pada 25 Januari 2016 melalui Putusan Nomor 133/PHP.BUP.XIV/2016.³³ Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi ketentuan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU

³³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 133/PHP.BUP.XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015

Nomor 8 Tahun 2015. Dengan demikian, kemenangan Dula–Geong sah secara hukum dan tak tergoyahkan.

Beberapa pekan kemudian, pada 17 Februari 2016, pasangan Agustinus Ch. Dula – Maria Geong dilantik secara resmi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.³⁴ Pelantikan ini menandai bukan hanya awal periode pemerintahan baru, tetapi juga simbol konsistensi politik di daerah ini — sebuah transisi yang tenang, stabil, dan membawa warna baru dengan hadirnya wakil bupati perempuan pertama di kabupaten ini.

Pilkada Keempat (2020): *Generasi Baru di Tengah Pandemi*

Tahun 2020 menjadi salah satu babak paling dramatis dalam perjalanan politik Manggarai Barat. Ketika pandemi COVID-19 mengguncang dunia dan memaksa hampir seluruh aktivitas sosial, ekonomi, hingga politik berhenti, demokrasi di Indonesia tetap harus berjalan. Pemerintah pusat, DPR, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan bahwa Pilkada serentak tetap digelar, dengan protokol kesehatan ketat sebagai pagar pelindung di tengah krisis kesehatan global.³⁵ Bagi Manggarai Barat, yang kala itu telah berusia tujuh belas tahun, ini bukan sekadar rutinitas politik lima tahunan. Ia adalah ujian

³⁴ Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53-114 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015.

³⁵ Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang. UU inilah yang kemudian menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020.

kedewasaan demokrasi lokal, sekaligus cermin kemampuan masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk menavigasi sebuah pesta demokrasi di bawah bayang-bayang ketakutan akan penularan penyakit yang belum ada obat pastinya.

Secara administratif³⁶, KPU Manggarai Barat menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 172.684 jiwa. Komposisi ini nyaris seimbang antara pemilih laki-laki (86.643 orang, 50,2%) dan perempuan (86.041 orang, 49,8%). Selain itu, terdapat 2.488 pemilih tambahan (DPTb) dan 389 pemilih disabilitas, sebuah indikasi bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk mereka yang rentan yang dijamin hak konstitusionalnya untuk memilih. Sebanyak 586 Tempat Pemungutan Suara (TPS) disiapkan, tersebar di 169 desa/kelurahan di 12 kecamatan. Dari pesisir Labuan Bajo yang menjadi wajah pariwisata nasional hingga gugusan pulau terpencil di perbatasan, penyelenggaraan pemilu kembali menguji kemampuan teknis, koordinasi, dan keuletan KPU di daerah dengan geografis yang kompleks dan beragam.

Kontestasi Pilkada 2020 diikuti oleh empat pasangan calon, masing-masing membawa warna dan konfigurasi politik yang berbeda:

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si dan Hj. Andi Riski Nur Cahya D, S.H.	Partai Demokrat, PKS, PPP
2	Drh. Maria Geong, Ph.D dan Silverius Sukur, S.P.	PDIP, PKB, Gerindra, Perindo

³⁶ Sebagian besar isi tulisan pada bagian ini, Pilkada Pertama (2020) di akses dari Laporan Tahapan Pilkada Manggarai Barat 2020

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung
3	Edistasius Endi, S.E. dan dr. Yulianus Weng, M.Kes	Nasdem, Golkar, PKPI
4	Adrianus Garu, S.E., M.Si dan Anggalinus Gapul, S.P., MMA	PAN, Hanura

Namun, dinamika politik langsung diuji melalui sengketa pencalonan. Pasangan Maria–Silverius menggugat KPU Manggarai Barat ke PTUN Surabaya,³⁷ setelah sebelumnya digugat ke Bawaslu Manggarai Barat atas penetapan pasangan Edistasius–Weng,³⁸ menilai calon tersebut memiliki riwayat hukum yang meragukan.

Hasilnya, PTUN Surabaya menolak gugatan pada 19 Oktober 2020, dan kasasi ke Mahkamah Agung juga ditolak pada 9 November 2020.³⁹ Putusan ini menegaskan status hukum pasangan Endi–Weng dan menghapus keraguan publik terkait legitimasi pencalonan mereka.

Setiap pasangan menyusun strategi, simbol, dan pesan politik masing-masing.

Pantas–Andi Riski membawa nuansa kombinasi birokrat-politisi dengan sentuhan figur muda. Maria–Silverius tampil sebagai perpanjangan kesinambungan

³⁷ Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020

³⁸ Sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 menetapkan pasangan calon peserta dalam Pilkada Manggarai Barat Tahun 2020

³⁹ Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pasangan calon pemohon. Putusan tersebut bersifat final dan mengikat, serta ditetapkan pada 9 November 2020

pemerintahan sebelumnya, mempertahankan basis loyalitas PDIP dan mitra partainya.

Endi-Weng datang sebagai wajah baru, mengusung modernisasi, pendekatan teknokratis, serta dukungan partai-partai dengan jaringan nasional kuat. Sementara Adrianus-Anggalinus mencoba memanfaatkan jejaring politik lama yang masih punya basis dukungan loyal di beberapa wilayah.

Dinamika ini terjadi di tengah kondisi kampanye yang berubah drastis. Tidak ada lagi panggung akbar dengan lautan massa. Kampanye tatap muka dibatasi, pertemuan dibagi dalam kelompok kecil, dan sebagian strategi dialihkan ke ruang daring. Para kandidat dipaksa lebih kreatif, mengandalkan narasi, rekam jejak, dan kapasitas personal untuk meyakinkan pemilih. Masyarakat pun dituntut lebih mandiri dalam menyerap dan membandingkan gagasan, karena interaksi langsung menjadi sangat terbatas.

Pada 9 Desember 2020, pemungutan suara digelar. Suasana TPS berbeda total dibanding Pilkada sebelumnya: petugas lengkap dengan masker, sarung tangan, dan face shield; antrean warga diatur berjarak; setiap pemilih mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos. Namun di balik protokol ketat itu, semangat demokrasi tetap menyala. Masyarakat Manggarai Barat tetap datang, tetap memilih, tetap ingin menentukan arah kepemimpinan daerah mereka di tengah situasi yang belum pernah dihadapi sebelumnya.

Tingkat partisipasi pemilih tercatat 77,91% atau 136.482 orang dari 175.172 pemilih yang terdaftar (termasuk DPTb). Angka ini membuktikan satu hal penting: meskipun ada rasa was-was, demokrasi tetap kuat di akar

rumput. Ketika kotak suara dibuka dan rekapitulasi rampung, peta politik Manggarai Barat berubah signifikan. Edistasius Endi – Yulianus Weng meraih kemenangan dengan 45.057 suara (33,2%), unggul atas Maria Geong – Silverius Sukur dengan 41.459 suara (30,6%), Pantas Ferdinandus – Andi Riski Nur Cahya memperoleh 29.593 suara (21,8%), dan Adrianus Garu – Anggalinus Gapul mendapat 19.412 suara (14,3%).

Kemenangan Endi–Weng terasa istimewa. Mereka bukan hanya unggul dalam angka, tetapi juga dalam sebaran dukungan. Mereka menang di mayoritas kecamatan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan, yang menunjukkan bahwa pesan dan strategi mereka berhasil menembus sekat-sekat kultural, politik, dan geografis. Sementara kandidat lain memiliki kantong dukungan khas, keunggulan Endi–Weng justru lahir dari distribusi suara yang merata. Jumlah suara sah tercatat 135.521, sementara suara tidak sah hanya 961 suara. Perihal ini menandakan tingkat akurasi, ketelitian, dan keseriusan pemilih di tengah situasi pemilu yang penuh protokol dan tekanan psikologis.

Makna kemenangan ini jauh melampaui pergantian nama di kursi bupati dan wakil bupati. Ia adalah tanda regenerasi. Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Manggarai Barat dipimpin oleh figur yang tidak terlibat langsung dalam perjuangan pemekaran kabupaten. Mereka adalah pemimpin dari generasi reformasi, lebih muda, lebih teknokratis, hadir membawa orientasi baru untuk menghadapi tantangan yang juga berbeda: bagaimana menyeimbangkan pariwisata premium Labuan Bajo dengan kesejahteraan masyarakat lokal, bagaimana memperluas layanan dasar di tengah kepadatan pembangunan, dan bagaimana menjaga integritas

demokrasi dalam pusaran kepentingan nasional dan global.

Pilkada 2020 pun tak lepas dari sengketa. Pasangan Maria Geong – Silverius Sukur mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK)⁴⁰, menggugat keabsahan hasil rekapitulasi suara yang telah ditetapkan KPU Manggarai Barat melalui Keputusan Nomor 127/PL.02.6-Kpt/5315/KPU-Kab/XII/2020 yang ditetapkan pada 16 Desember 2020, pukul 18.02 Wita. Dalam perkara itu, pasangan Endi-Weng berkedudukan sebagai Pihak Terkait, mempertahankan legitimasi kemenangan yang sudah diumumkan secara resmi.

Namun, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 dengan tegas menyatakan bahwa pokok permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah tidak memasuki pemeriksaan substansi lebih lanjut. Sengketa ditutup, kemenangan Endi-Weng dikukuhkan sebagaimana tertuang dalam tertuang dalam Keputusan KPU Manggarai Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 10/PL.02.7-BA/5315/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih di Pilkada Manggarai Barat 2020.

Semula, pelantikan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih direncanakan digelar secara virtual di Aula Setda Labuan Bajo. Namun, Pemerintah Provinsi NTT memutuskan pelantikan dilaksanakan secara langsung di

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020

Kupang⁴¹, bersama dengan kepala daerah lain se-provinsi NTT. Tepatnya, pada 26 Februari 2021, sekitar pukul 15.00 WITA, Edistasius Endi dan Yulianus Weng diambil sumpahnya oleh Gubernur NTT.⁴² Manggarai Barat resmi memasuki era baru generasi baru kepemimpinan, lahir di tengah pandemi, memulai langkah di bawah situasi yang jauh dari normal, tetapi dengan harapan yang justru makin besar.

Pilkada Kelima (2024):

Pertarungan Dua Poros, Kemenangan Tipis, dan Sengketa di Meja Konstitusi

Tahun 2024 menjadi salah satu babak paling menegangkan dalam perjalanan demokrasi Manggarai Barat. Indonesia baru saja menyelesaikan Pemilu Presiden dan Legislatif pada Februari, dan suhu politik nasional yang masih panas segera bergeser ke arena Pilkada Serentak Nasional di penghujung tahun.⁴³ Irama koalisi di Jakarta bergaung hingga ke Labuan Bajo, Lembor, Kuwus, Macang Pacar, bahkan pulau-pulau kecil di perairan Manggarai Barat. Politik daerah bukan lagi ruang yang berdiri sendiri; arah gerak nasional kini bersentuhan langsung dengan kalkulasi politik lokal, mempertemukan strategi partai, kepentingan pusat, dan aspirasi warga di garis depan demokrasi daerah.

⁴¹ Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/966/OTDA Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah Pandemi COVID-19.

⁴² Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.53-294 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; pelantikan dilakukan oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat di Kupang.

⁴³ Sebagian besar isi tulisan pada bagian ini, Pilkada Pertama (2024) di akses dari Laporan Tahapan Pilkada Manggarai Barat 2024

Berbeda dengan Pilkada-Pilkada sebelumnya yang sering diwarnai banyak kandidat dan peta dukungan yang terpecah, kontestasi 2024 mengerucut menjadi duel dua poros besar. Dari sejumlah nama yang sempat beredar, akhirnya hanya dua pasangan calon yang mendaftar, diverifikasi, dan ditetapkan oleh KPU Manggarai Barat.

Poros pertama adalah pasangan calon nomor urut 1: Christo Mario Y. Pranda dan Richard Tata Sontani, duet muda yang menyimpan jejak sejarah sekaligus harapan baru. Mario Pranda, kelahiran 2 Februari 1988, adalah putra dari Fidelis Pranda, Bupati pertama Manggarai Barat, tokoh yang ikut mengawal lahirnya kabupaten ini dua dekade sebelumnya. Generasi baru itu datang membawa energi berbeda. Berasal dari Partai Demokrat, menjabat Sekretaris DPC, Mario tampil sebagai figur yang sudah teruji di panggung politik: meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024, namun memilih tidak dilantik sebagai anggota DPRD demi fokus penuh bertarung di arena eksekutif.

Di luar politik, Mario adalah pengusaha aktif, Ketua HIPMI Manggarai Barat, dan pernah berkecimpung di dunia hukum sebagai pengacara di Jakarta. Kombinasi pengalaman hukum, bisnis, dan politik menjadikannya figur yang dianggap memahami seluk-beluk regulasi sekaligus denyut ekonomi lokal.

Pasangannya, Richard Tata Sontani, lahir 21 November 1987, adalah birokrat teknis yang matang. Lulus IPDN Bandung di bidang Manajemen Pembangunan Daerah, melanjutkan S2 Administrasi Pemerintahan Daerah di Jakarta, Richard meniti karier dari bagian perencanaan, mengurus infrastruktur kewilayahan, hingga dipercaya menjabat Kepala Bagian Administrasi di Setda Manggarai Barat. Duet Mario-Richard memadukan darah politik

dengan disiplin teknokrasi, menawarkan alternatif kepemimpinan yang menjanjikan koreksi arah kebijakan dan pemerataan pembangunan tanpa meninggalkan fondasi birokrasi yang rapi.

Koalisi yang mengusung mereka luas dan bervariasi: sembilan partai berdiri di belakangnya yakni Partai Ummat, PAN, Perindo, PSI, Gelora, PKN, Demokrat, Buruh, dan Golkar. Dengan kekuatan lintas spektrum ini, mereka mengusung visi “Terwujudnya Manggarai Barat yang MENYALA”: Maju, Aman, Sejahtera, Makmur, dan Unggul. Visi tersebut dijabarkan melalui enam misi besar: revolusi infrastruktur dasar (*Triple T dan JAL*), penegakan hukum dan HAM, peningkatan kualitas SDM, penguatan ekonomi berbasis masyarakat, daya saing daerah, serta percepatan pelayanan publik yang responsif.

Di seberang arena, berdiri poros petahana: pasangan calon nomor urut 2, Edistasius Endi dan dr. Yulianus Weng, sebagai duet yang lima tahun terakhir memimpin Manggarai Barat. Edistasius Endi, kelahiran 25 September 1972, adalah politisi kawakan yang mengawali kiprahnya di DPRD sebelum melangkah ke eksekutif. Kemenangannya pada Pilkada 2020 membawa Manggarai Barat melewati masa pandemi dengan stabilitas relatif terjaga, sementara kiprahnya di tingkat provinsi naik kelas hingga menduduki posisi Ketua DPW Partai NasDem NTT.

Yulianus Weng, mantan Kepala Dinas Kesehatan, dikenal sebagai figur teknokrat yang berani meninggalkan jalur birokrasi demi terjun ke politik praktis. Berawal di Golkar lalu beralih di Gerindra, Weng melengkapi kekuatan petahana sebagai simbol kolaborasi lintas jaringan dan modal teknis yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Pasangan ini diusung tujuh partai besar: PDIP, NasDem, PKS, PKB, PBB, PPP, dan Gerindra. Visi mereka sederhana namun sarat pesan kontinuitas: “Menuju Mabar yang Semakin MANTAP”: Maju, Unggul, Tangguh, dan Populer. Narasi MANTAP bukan sekadar slogan; ia adalah seruan agar momentum Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas dimanfaatkan maksimal tanpa kehilangan keseimbangan sosial dan kearifan lokal. Lima misi mereka menegaskan arah pembangunan berkelanjutan: memperkuat sektor pariwisata, mengoptimalkan sektor primer, mempercepat peningkatan SDM, memperluas dan pemeratakan infrastruktur, serta memodernisasi tata kelola pemerintahan berbasis *e-government*.

Nomor Urut	Pasangan Calon	Koalisi Pengusung
Paslon Nomor Urut 1	Christo Mario Y. Pranda & Richard Tata Sontani	Partai Ummat, PAN, Perindo, PSI, Gelora, PKN, Demokrat, Buruh, Golkar (9 partai).
Paslon Nomor Urut 2	Edistasius Endi & dr. Yulianus Weng	PDIP, NasDem, PKS, PKB, PBB, PPP, Gerindra (7 partai) menyusul Hanura setelah pendaftaran.

Dengan hanya dua poros, tensi kampanye meninggi. Tidak ada ruang abu-abu; setiap isu langsung membelah dukungan, setiap strategi menjadi bahan perdebatan publik. Dari Labuan Bajo yang hiruk-pikuk dengan proyek pariwisata kelas dunia, sampai desa-desa di lereng dan pulau-pulau terpencil, masyarakat terpolarisasi dalam

dua kubu besar. Percakapan politik meresap ke warung kopi, pelabuhan nelayan, ruang rapat adat, hingga grup pesan singkat di ponsel warga. Isu utama mengerucut: mempertahankan arah pembangunan pariwisata premium dengan segala potensi ekonominya atau menggeser fokus ke pemerataan sektor tradisional dan pemenuhan kebutuhan warga di luar kawasan wisata unggulan.

Secara teknis, KPU Manggarai Barat mencatat 199.749 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sejumlah 99.214 pemilih laki-laki dan 100.535 pemilih perempuan yang tersebar di 587 TPS pada 169 desa/kelurahan di 12 kecamatan. Pemungutan suara berlangsung serentak secara nasional pada 27 November 2024. Namun, partisipasi pemilih kali ini hanya mencapai 72,91% penurunan yang menyiratkan bahwa tensi politik tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan keterlibatan maksimal di bilik suara.

Rekapitulasi resmi yang diumumkan KPU Manggarai Barat pada 3 Desember 2024 menjadi catatan penting dalam sejarah politik daerah ini. Angka-angka yang dibacakan bukan hanya sekadar data, melainkan cerminan perubahan arah pilihan rakyat yang membentuk wajah kepemimpinan baru Manggarai Barat:

No	Pasangan Calon	Suara Sah
1	Christo Mario Y. Pranda – Richard Tata Sontani (<i>Mario–Richard</i>)	71.164
2	Edistasius Endi – Yulianus Weng (<i>Edi–Weng</i>)	73.872
Total Suara Sah		145.036

Selisih hanya 2.708 suara atau kurang dari dua persen dari total suara sah yang kemudian segera membuka ruang sengketa⁴⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016.

Pertarungan di kotak suara ternyata belum menutup babak politik. Babak kedua dibuka namun bukan di jalanan, melainkan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Tim Mario–Richard mengajukan permohonan sengketa PHPU, menuding terjadi pelanggaran dan kecurangan yang “terstruktur, sistematis, dan masif” (TSM) di hampir seluruh wilayah kabupaten. Dalil mereka mencakup politik uang, pelanggaran hak pilih, ketidaknetralan ASN dan aparat desa, politisasi birokrasi, kelalaian penyelenggara, hingga persoalan administratif yang menyoal keabsahan pencalonan petahana.

Mario–Richard bahkan mengklaim, tanpa seluruh pelanggaran itu, seharusnya merekalah yang unggul dengan selisih kebalikan dari hasil resmi. Mereka meminta MK membatalkan Keputusan KPU Manggarai Barat Nomor 804 Tahun 2024 dan mengesahkan versi perolehan suara yang mereka ajukan. Sidang di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung akhir pertarungan legitimasi. Pada Rabu, 5 Februari 2025, majelis hakim yang dipimpin Ketua MK Dr. Suhartoyo bersama delapan hakim anggota membacakan putusan. MK memutuskan permohonan Mario–Richard tidak dapat diterima, dengan alasan melewati tenggang waktu pengajuan sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 dan

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

PMK 3/2024. Sengketa pun berakhir di meja konstitusi, mengukuhkan kemenangan Edi-Weng sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat periode 2024–2029.

Pasca sengketa panjang, momentum resmi berpindah ke pusat. Sebelumnya, KPU Manggarai Barat telah menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih pada 6 Februari 2025. Dua minggu kemudian, Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara simbolis melantik Edistasius Endi dan dr. Yulianus Weng sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat. Prosesi nasional ini memperkuat legitimasi hasil Pilkada serentak.⁴⁵

Setelahnya, keduanya mengikuti retreat kepemimpinan di Akademi Militer Magelang (21–28 Februari 2025)⁴⁶, sebelum akhirnya, 3 Maret 2025, kembali ke Labuan Bajo. Kedatangan mereka disambut meriah oleh masyarakat, tokoh adat, dan aparaturnya daerah bahwa menegaskan bahwa legitimasi politik tidak hanya bersandar pada putusan hukum, tetapi juga pada penerimaan publik.

Babak kelima Pilkada Manggarai Barat ini meninggalkan kesan mendalam. Demokrasi lokal telah memasuki fase kompetisi matang yang bukan lagi soal dominasi satu figur atau jaringan lama, melainkan pertarungan legitimasi yang menguji strategi, integritas, dan daya tahan institusi demokrasi. Polarisasi dua poros besar kini

⁴⁵ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Periode 2024–2029; prosesi pelantikan dilaksanakan di Istana Merdeka, Jakarta, oleh Presiden Prabowo Subianto.

⁴⁶ Program Retreat Kepemimpinan Kepala Daerah Serentak 2024, Akademi Militer Magelang, 21–28 Februari 2025, yang diikuti oleh para bupati/wakil bupati terpilih dari berbagai daerah.

menjadi ciri baru politik lokal: dua kekuatan yang relatif seimbang, saling mengawasi, saling menguji, sekaligus menjaga agar demokrasi tetap berdiri di atas relnya.

Kemenangan tipis yang diwarnai sengketa panjang ini adalah pelajaran berharga. Di satu sisi, ia menguji kekuatan institusi demokrasi mulai dari KPU, Bawaslu, hingga MK; di sisi lain, ia menegaskan bahwa kedaulatan rakyat tidak boleh ditawar, sekalipun dalam tensi politik yang tajam. Justru dalam ketegangan itulah demokrasi menemukan maknanya: sebuah mekanisme yang memberi ruang bagi perbedaan, sekaligus memastikan bahwa perbedaan itu tetap bermuara pada kepastian hukum dan legitimasi rakyat.

BAB VI

ANALISIS DAN SINTESIS POLITIK LOKAL

Dua dekade penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Manggarai Barat tidak hanya menghasilkan daftar nama bupati dan wakil bupati, tetapi juga menghadirkan cermin tentang bagaimana demokrasi lokal bekerja, berubah, dan beradaptasi dengan tantangan zaman. bagian ini menyajikan analisis mendalam atas perjalanan tersebut, memetakan tren partisipasi pemilih, pergeseran kekuatan politik, dinamika kepemimpinan, hingga peran masyarakat sipil, media, dan adat yang ikut mewarnai setiap kontestasi. Lebih jauh, bagian ini mengkaji pula bagaimana sektor ekonomi dan pariwisata yang berkembang pesat memberi pengaruh pada konfigurasi politik lokal, serta menilai kinerja lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu dalam menjaga integritas proses demokrasi. Sintesis dari berbagai temuan ini diharapkan menjadi bahan refleksi yang bernilai: bukan semata untuk mengenang sejarah, melainkan sebagai dasar memperkuat kualitas demokrasi Manggarai Barat di masa mendatang.

Tren Partisipasi Pemilih (2005–2024)

Dua dekade perjalanan demokrasi lokal di Manggarai Barat memperlihatkan satu hal penting: warga daerah ini bukan hanya penonton politik, melainkan aktor yang sejak awal mau terlibat aktif dalam menentukan arah daerahnya. Tingkat partisipasi pemilih dalam lima kali pemilihan kepala daerah langsung menjadi cermin dari

bagaimana semangat politik masyarakat bergerak, berubah, dan beradaptasi dengan konteks zaman.

Tahun	Jumlah Pemilih (DPT)	Jumlah TPS	Jumlah Partisipasi Kecamatan Masyarakat
2005	106.718	485	5 88,8 %
2010	127.677	486	7 89 %
2015	156.460	493	10 73,7 %
2020	172.684	586	12 77,91 %
2024	199.749	587	12 72,33 %

Pada Pilkada perdana tahun 2005, antusiasme warga mencapai puncaknya. Dengan daftar pemilih tetap (DPT) sekitar 106 ribu orang, tercatat hampir 88 persen hadir di tempat pemungutan suara. Angka ini, jika dibaca dalam konteks nasional, termasuk kategori sangat tinggi. Wajar saja: Manggarai Barat saat itu baru berusia dua tahun sebagai kabupaten otonom, dan Pilkada pertama adalah peristiwa bersejarah. Ia bukan sekadar agenda politik, melainkan penegasan identitas daerah, perayaan atas perjuangan panjang pemekaran, dan momentum warga untuk merasakan secara langsung hak memilih pemimpin daerahnya, sesuatu yang sebelumnya hanya bisa dibicarakan dalam ruang-ruang aspirasi dan forum adat.

Lima tahun kemudian, tahun 2010, semangat tinggi itu ternyata bertahan. Sekitar 127.677 pemilih terdaftar, dan partisipasi masih di angka yang sama yakni 88 %. Menariknya, kali ini politik Manggarai Barat lebih kompleks. Bukan hanya ada lebih banyak pemilih, tetapi juga lebih banyak kandidat, yakni delapan pasangan

calon bersaing, memperlihatkan betapa terbukanya arena politik pasca pemekaran.

Fragmentasi kandidat justru meningkatkan mobilisasi setiap jaringan politik, sosial, dan adat bergerak, mengajak warganya hadir di 486 TPS, memastikan dukungan mereka terhitung. Namun di balik gairah itu, muncul dinamika baru sengketa hukum panjang, putusan yang berlapis-lapis, dan perdebatan mengenai legitimasi pemerintahan. Dari sisi akademik, fase ini mengajarkan bahwa tingginya partisipasi tidak selalu identik dengan stabilitas politik; justru di titik inilah kualitas tata kelola pemilu diuji secara serius.

Memasuki 2015, Manggarai Barat ikut dalam gelombang nasional Pilkada serentak. Bukan lagi “pemilu khusus kabupaten baru”, tetapi bagian dari arsitektur demokrasi Indonesia yang lebih besar dan lebih terkoordinasi. Di titik ini, tanda-tanda penurunan partisipasi mulai terlihat. Dengan DPT sejumlah 156.460 pemilih, partisipasi turun ke kisaran 73,7 %. Penurunan ini bukan tanda apatisisme murni; ia lebih tepat dibaca sebagai proses normalisasi. Antusiasme awal pemekaran dan “romantisme demokrasi baru” mulai bergeser ke arah kalkulasi politik yang lebih realistis. Pemilih sudah semakin kritis, tidak lagi terbawa arus euforia. Mereka hadir, tetapi sebagian mulai jenuh dengan konflik elite yang berulang dan sengketa hukum yang melelahkan.

Tahun 2020 menandai fase baru yang unik yakni Pilkada di tengah pandemi COVID-19. Secara logis, partisipasi diperkirakan turun signifikan karena kekhawatiran kesehatan, pembatasan kampanye, dan situasi psikologis masyarakat yang waspada. Namun data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masih bertahan di angka 77,91 persen, dengan 136 ribu pemilih hadir dari total 172.684

pemilih terdaftar. Angka ini relatif tinggi jika dibandingkan daerah lain di Indonesia pada periode yang sama. Fakta ini menyiratkan dua hal, pertama, Manggarai Barat memiliki modal sosial yang kuat yakni masyarakatnya terbiasa menanggapi Pilkada bukan sekadar ritual lima tahunan, tetapi keputusan strategis untuk arah pembangunan daerah dan kedua, manajemen pemilu oleh penyelenggara di daerah ini cukup berhasil menjaga kepercayaan publik, bahkan di tengah krisis kesehatan global.

Namun, momentum politik 2024 menghadirkan babak yang berbeda. Dengan DPT mendekati 200 ribu, yakni 199.749 pemilih, partisipasi justru turun ke 72,33 %. Padahal, kontestasinya sangat dramatis yakni hanya dua poros besar bertarung, tensi politik tinggi, polarisasi masyarakat terasa dari kota hingga desa. Secara teoretis, kontestasi yang tajam seringkali memicu partisipasi naik karena pemilih merasa suaranya benar-benar menentukan arah akhir.

Namun di Manggarai Barat, yang terjadi sebaliknya pertarungan yang intens ternyata tidak diikuti oleh keterlibatan maksimal. Gejala ini oleh banyak analis disebut sebagai kejenuhan politik yakni kondisi di mana sebagian pemilih memilih “menepi” bukan karena tidak peduli, tetapi karena merasa pertarungan politik tidak lagi menawarkan perbedaan substantif yang menyentuh kehidupan mereka sehari-hari. Ditambah lagi dengan persoalan teknis seperti perubahan lokasi dan restrukturisasi TPS pasca Pemilu serentak 2024.

Fenomena ini sekaligus memperlihatkan fase kematangan demokrasi lokal yang kompleks. Partisipasi awal tinggi karena euforia pembentukan daerah dan semangat otonomi; kemudian stabil cukup lama; lalu perlahan

menurun seiring politik menjadi semakin teknis, pragmatis, dan terhubung erat dengan kalkulasi partai di tingkat nasional. Faktor geografis — wilayah kepulauan, jarak ke TPS, cuaca — tetap relevan sebagai tantangan klasik, tetapi bukan lagi satu-satunya variabel. Dinamika sosial, psikologi pemilih, efektivitas komunikasi kandidat, dan kualitas kepercayaan terhadap institusi pemilu kini memainkan peran yang sama besarnya.

Jika disederhanakan, grafik partisipasi pemilih Manggarai Barat dalam dua dekade terakhir menyerupai kurva tinggi di awal, stabil di tengah, kemudian melandai perlahan. Ia bukan gejala kemunduran, melainkan tanda bahwa demokrasi lokal sedang mencari bentuk keseimbangannya sendiri: antara gairah partisipasi, rasionalitas pilihan, dan kelelahan menghadapi turbulensi politik yang tak pernah benar-benar hening.

Pola Pergeseran Partai Politik dan Koalisi

Jika partisipasi pemilih adalah cermin kesadaran masyarakat, maka peta koalisi dan partai politik adalah barometer dari arah angin kekuasaan. Dalam dua dekade terakhir, Pilkada Manggarai Barat memperlihatkan satu pola menarik: dari panggung yang dikuasai figur-figur lokal dengan jejaring personal, menuju arena politik yang semakin menyerupai miniatur dinamika nasional yang lebih cair, strategis, dan penuh kalkulasi.

Tanggal Pemungutan Suara	Pasangan Pemenang	Koalisi / Jalur	Suara Sah
27 Juni 2005	Wilfridus Fidelis Pranda –	Demokrat, PDK, PNBK,	50.032

Tanggal Pemungutan Suara	Pasangan Pemenang	Koalisi / Jalur	Suara Sah
	Agustinus Ch. Dula	PKS, PBB, PDS, PKB	
3 Juni 2010	Agustinus Ch. Dula – Maximus Gasa	PAN, PPPDI, Demokrat, PKNU, Partai Pelopor	34.972
9 Des. 2015	Agustinus Ch. Dula – Maria Geong	Koalisi PDIP & partai besar lainnya	29.358
9 Des. 2020	Edistasius Endi – Yulianus Weng	NasDem, Golkar, PBB, PKPI	45.057
27 Nov. 2024	Edistasius Endi – Yulianus Weng	PDIP, NasDem, PKS, PKB, PBB, PPP, Gerindra	73.872

Pada Pilkada perdana tahun 2005, komposisi kandidat dan partai politik masih sepenuhnya diwarnai wajah-wajah lokal. Tiga pasangan calon bertarung, semuanya didukung koalisi yang lebar namun belum mencerminkan blok ideologis yang jelas. Partai hanyalah kendaraan, bukan pusat arah. Mereka merapat pada figur, bukan figur mencari restu partai. Di titik ini, loyalitas masyarakat lebih kuat kepada nama-nama yang dikenalnya, bukan pada lambang-lambang partai di belakang mereka. Inilah fase “politik berbasis figur”, khas daerah pemekaran baru, di mana modal sosial lebih menentukan daripada warna partai.

Lima tahun kemudian, tepatnya 2010, politik Manggarai Barat meledak dalam fragmentasi. Delapan pasangan calon maju sekaligus — jumlah yang luar biasa untuk sebuah kabupaten muda. Koalisi partai berubah menjadi eksperimen besar-besaran: hampir semua kombinasi mungkin dicoba. Tidak ada blok dominan; partai-partai nasional yang secara tradisional kuat di pusat pun di sini belum punya pijakan yang stabil. Politik daerah saat itu terasa seperti pasar ide dan strategi terbuka, di mana kekuatan figur, sumber daya, dan jaringan adat lebih menentukan hasil daripada komposisi partai di belakangnya. Akademisi politik menyebut fase ini sebagai politik transisi, ketika institusi partai belum sepenuhnya mengakar, tetapi sistem pemilu langsung sudah memaksa mereka bergerak cepat dan adaptif.

Momentum 2015 menjadi titik balik. Pilkada serentak pertama membawa efek harmonisasi sistem politik lokal dengan desain nasional. Koalisi tidak lagi semata-mata eksperimen, tetapi mulai menunjukkan garis keteraturan. Partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, NasDem, dan PAN muncul dengan basis dukungan yang lebih jelas. Figur petahana Agustinus Dula, misalnya, tidak lagi hanya mengandalkan modal personal, tetapi juga sokongan partai nasional yang disusun rapi dalam strategi koalisi. Ini adalah fase ketika politik personal mulai berkelindan dengan politik institusional. Partai tidak lagi sekadar menempel; mereka menjadi bagian dari strategi jangka panjang yang memengaruhi distribusi sumber daya, negosiasi di DPRD, dan perencanaan pembangunan daerah.

Lompatan signifikan terjadi di Pilkada 2020. Untuk pertama kalinya, koalisi di Manggarai Barat memotong garis lama yang berbasis loyalitas personal dan menyusun

aliansi yang mencerminkan dinamika politik pusat. PDIP dan Gerindra, dua partai yang di tingkat nasional sering berada di kutub berbeda, justru bersatu dalam satu poros. Sebaliknya, Golkar dan NasDem yang sebelumnya jarang bersekutu di daerah ini, kini membentuk blok tandingan. Pergeseran ini bukan kebetulan; ia adalah tanda bahwa politik lokal semakin dipengaruhi kalkulasi nasional. Partai-partai besar menggunakan Pilkada bukan hanya untuk mengamankan posisi lokal, tetapi juga untuk mengatur ritme aliansi yang akan memengaruhi konstelasi politik tingkat provinsi dan pusat.

Puncaknya terlihat pada Pilkada 2024. Kontestasi bukan lagi pertarungan banyak figur yang merebut perhatian publik, melainkan duel dua poros besar yang sangat menyerupai logika pemilu nasional. Sembilan partai di satu sisi, tujuh partai di sisi lain. Tidak ada lagi koalisi kecil yang “hanya mencukupi syarat pencalonan”; semua blok tersusun dengan perhitungan serius: suara nasional, kekuatan legislatif lokal, hingga relasi dengan jaringan pemerintahan pusat. Politik personal belum mati — nama-nama seperti Mario Pranda tetap memegang nilai simbolik — tetapi pengaruhnya kini harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas: tanpa dukungan partai besar dan jejaring lintas pusat-daerah, figur populer sekalipun sulit bertahan dalam pertarungan yang makin profesional dan terstruktur.

Implikasinya jelas: Manggarai Barat bukan lagi sekadar daerah pemekaran yang “belajar” demokrasi. Ia kini sepenuhnya terhubung dengan ekosistem politik Indonesia yang lebih besar. Koalisi di tingkat lokal bukan lagi refleksi murni dari jaringan sosial dan kedekatan personal, melainkan hasil dari kalkulasi politik multi-level — menggabungkan aspirasi akar rumput dengan

kepentingan strategis partai nasional. Namun, satu hal tetap konsisten: basis lokal tetap menentukan. Partai dan koalisi boleh berubah arah mengikuti dinamika pusat, tetapi tanpa pijakan sosial yang kuat di desa-desa, pesisir, dan pulau-pulau kecil, semua strategi di atas kertas hanyalah skema tanpa daya elektoral.

Dalam perspektif akademik, perjalanan ini mencerminkan evolusi tipikal demokrasi daerah pasca-reformasi: dari patronase berbasis figur, menuju institusionalisasi partai, dan akhirnya menyatu dengan logika sistemik nasional. Politik Manggarai Barat, dengan segala keunikan geografis dan sosialnya, kini telah menjadi bagian dari peta besar Indonesia — bukan hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam cara kekuatan politik bertarung, berkoalisi, dan mengelola kekuasaan.

Dinamika Figur dan Regenerasi Kepemimpinan

Politik lokal tidak hanya bicara tentang partai dan koalisi; ia juga menyangkut figur — sosok-sosok yang, lewat visi, jaringan, dan kepribadian mereka, memberi wajah pada demokrasi. Dalam dua dekade terakhir, Manggarai Barat mengalami tiga fase penting dalam hal figur kepemimpinan: fase pendiri, fase konsolidasi, dan fase regenerasi penuh. Masing-masing membawa dinamika berbeda, tetapi semuanya terhubung oleh benang merah yang sama: mencari arah terbaik bagi daerah muda yang lahir dari aspirasi panjang masyarakatnya.

1. Fase Pendiri (2005–2010): Dari Aspirasi Menjadi Kepemimpinan Nyata

Ketika Manggarai Barat lahir sebagai kabupaten otonom baru pada 2003, tantangan terbesarnya bukan sekadar membentuk pemerintahan, tetapi juga mencari figur yang mampu memimpin daerah muda ini keluar dari bayang-bayang kabupaten induk. Nama-nama seperti Drs. Fidelis Pranda dan Drs. Agustinus Dula hadir sebagai arsitek awal politik lokal. Mereka bukan sekadar politisi; mereka adalah bagian dari generasi yang ikut memperjuangkan pemekaran, memahami aspirasi masyarakat, dan punya legitimasi moral untuk memimpin transisi dari status administratif menjadi entitas pemerintahan yang hidup.

Pilkada pertama tahun 2005 menjadi panggung lahirnya kepemimpinan definitif. Fidelis Pranda, birokrat senior yang sebelumnya ditunjuk sebagai pejabat bupati, maju bersama Agustinus Dula sebagai wakilnya. Kemenangan mereka bukan hanya kemenangan politik, tetapi juga validasi sosial: masyarakat mempercayakan masa depan kabupaten muda ini pada figur-figur yang dianggap paling memahami “roh kelahiran” Manggarai Barat.

Fase ini membentuk tradisi awal politik lokal: kepemimpinan berbasis perjuangan pemekaran, di mana modal sejarah dan kedekatan emosional menjadi faktor dominan dalam pilihan politik masyarakat.

2. Fase Konsolidasi (2010–2020): Mengelola Stabilitas dan Membuka Ruang Baru

Lima tahun kemudian, politik Manggarai Barat memasuki babak baru. Dari sekadar mengawal lahirnya daerah, kini yang dibutuhkan adalah konsolidasi — merapikan birokrasi, membangun infrastruktur dasar, dan menyiapkan daerah agar bisa bersaing dalam konteks provinsi dan nasional. Di titik ini, figur Agustinus Dula naik kelas. Dari wakil bupati ia maju sebagai calon bupati, memimpin dua periode berturut-turut (2010–2015 dan 2015–2020).

Kepemimpinan Dula ditandai oleh dua hal: kontinuitas dan adaptasi. Di satu sisi, ia mempertahankan arah dasar pembangunan dan jaringan politik awal yang terbukti efektif menjaga stabilitas; di sisi lain, ia membuka ruang bagi figur-figur baru, seperti Drh. Maria Geong, Ph.D., yang mencatat sejarah sebagai wakil bupati perempuan pertama Manggarai Barat. Kehadiran Maria memberi warna baru: memperkenalkan kepemimpinan teknokratik, memperluas representasi gender, dan menjadi tanda bahwa politik Manggarai Barat mulai lepas dari struktur lama yang didominasi figur pria dari jaringan awal pemekaran.

Periode ini juga menyaksikan masuknya Edistasius Endi dan Yulianus Weng sebagai pasangan bupati-wakil bupati terpilih pada 2020. Meski lahir di penghujung fase ini, kemenangan Endi–Weng secara simbolik menandai bahwa generasi lama mulai memberi tempat pada generasi baru — orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam sejarah pemekaran,

tetapi hadir membawa pendekatan yang lebih teknokratis dan modern, sesuai tantangan Manggarai Barat yang kini telah menjadi kawasan strategis nasional lewat pariwisata Labuan Bajo.

3. Fase Regenerasi Penuh (2020–2024): Politik Lepas dari Bayang-Bayang Pendiri

Kemenangan Endi–Weng pada Pilkada 2020 adalah titik balik yang jelas: untuk pertama kalinya sejak berdiri, Manggarai Barat dipimpin oleh figur-figur yang tidak berasal dari lingkaran perjuangan pemekaran. Inilah fase di mana politik lokal benar-benar mulai dikelola oleh generasi pasca-pendiri, dengan orientasi yang lebih pragmatis, lebih teknis, dan terhubung erat dengan strategi partai di tingkat provinsi dan pusat.

Namun dinamika tidak berhenti di situ. Pilkada 2024 menghadirkan fenomena yang menarik: masuknya Christo Mario Y. Pranda — putra dari bupati pertama Manggarai Barat — ke arena kontestasi, menandai dimulainya politik generasi kedua. Jika generasi pendiri berjuang membangun kabupaten dari nol, generasi kedua hadir membawa isu koreksi arah, pemerataan, dan modernisasi, seringkali dengan pendekatan yang lebih profesional, memanfaatkan jejaring bisnis dan teknologi, bukan lagi sekadar modal sejarah.

Walaupun pada akhirnya pasangan petahana Endi–Weng mempertahankan kursinya dengan kemenangan tipis, munculnya Mario Pranda di panggung Pilkada adalah tanda bahwa politik Manggarai Barat telah memasuki siklus regenerasi penuh: kini bukan lagi

soal figur siapa yang memekarkan, tetapi siapa yang paling mampu mengelola Manggarai Barat sebagai daerah strategis, destinasi pariwisata premium, sekaligus rumah bagi ribuan warga yang membutuhkan pelayanan publik merata dan berkeadilan.

Dari perspektif akademik, ketiga fase ini mencerminkan evolusi tipikal demokrasi daerah pasca-pemekaran:

1. Legitimasi berbasis sejarah – masa ketika memimpin berarti melanjutkan aspirasi awal dan menjaga identitas baru daerah.
2. Konsolidasi kelembagaan – fokus pada stabilitas dan penataan internal, dengan perlahan membuka ruang bagi figur dan isu baru.
3. Kompetisi meritokratis – politik mulai menilai kapasitas, visi, dan strategi, bukan lagi hanya latar belakang sejarah atau kedekatan emosional.

Dengan kata lain, Manggarai Barat telah melewati fase “politik emosional” menuju “politik rasional”, sebuah perjalanan yang di banyak daerah lain di Indonesia masih berlangsung dengan tempo yang lebih lambat.

Dinamika Sengketa Pilkada Manggarai Barat (2005–2024): Politik yang Tak Hanya Diputus di Kotak Suara

Pilkada adalah pesta demokrasi. Namun, di Manggarai Barat, dua dekade pengalaman menunjukkan bahwa pesta itu sering belum benar-benar selesai ketika suara sudah dihitung. Dalam banyak kasus, hasilnya masih harus diuji, dibantah, bahkan dibatalkan melalui jalur hukum. Dinamika sengketa Pilkada di kabupaten ini

bukan sekadar catatan yuridis kering; ia adalah cermin ketegangan antara kompetisi politik yang intens, kapasitas kelembagaan yang berkembang, dan kebutuhan menjaga stabilitas pemerintahan di daerah muda dan strategis.

Tahun	Jenis Sengketa	Perkara / Nomor Putusan
2005	Sengketa hasil pemilihan	MA RI, Putusan No. 41 P/Kada/2005
2010	Sengketa administrasi & hasil pemilihan	- PT TUN Kupang: Putusan No. 04/G/2010/PT.TUN.KPG - MA: Putusan No. 04 K/TUN/2011 - MK (PHPU): Perkara No. 38/PHPU.D-VIII/2010
2015	Sengketa hasil pemilihan (PHPU)	MK: Perkara No. 38/ PHP.BUP-XIV/2016
2020	Sengketa administrasi & hasil pemilihan	- PT TUN Surabaya: Putusan No.4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY- - MA (Kasasi): Putusan No. 600 K/TUN/ PILKADA/2020 - MK (PHPU): Perkara No. 50/PHP.BUP-XIX/2021
2024	Sengketa hasil pemilihan	MK: Putusan No. 65/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Sengketa Awal: Legitimasi yang Harus Diuji (2005)

Pilkada pertama tahun 2005 digelar dalam suasana euforia pemekaran. Partisipasi tinggi, dukungan publik luas, tetapi tidak menutup ruang sengketa. Persoalan hasil pemilihan dibawa ke Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. 41 P/Kada/2005. Dalam fase ini, sengketa lebih bersifat pengujian legalitas awal — memastikan bahwa hasil yang diumumkan memang sah secara prosedural. Dari sisi akademik, hal ini wajar: daerah baru sedang belajar berdemokrasi, dan jalur hukum adalah cara paling aman untuk menghindari konflik terbuka.

2. Pilkada 2010: “Tiga Arena Sengketa, Satu Daerah yang Guncang”

Tahun 2010 menandai bab paling rumit dalam sejarah politik Manggarai Barat. Delapan pasangan calon membuat kontestasi sangat kompetitif. Ketegangan pasca-pemilu meledak dalam serangkaian sengketa di tiga arena sekaligus: PT TUN Kupang (Putusan No. 04/G/2010/PT.TUN.KPG), Mahkamah Agung (Putusan No. 04 K/TUN/2011), dan Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 38/PHPU.D-VIII/2010).

Sengketa yang berlarut-larut ini menciptakan fenomena dualisme legitimasi: secara politik, pemerintahan berjalan; secara hukum, putusan pengadilan menghasilkan tafsir berbeda. Pada akhirnya, pilihan pragmatis diambil: stabilitas diutamakan, sementara pelaksanaan putusan hukum tidak sepenuhnya dieksekusi. Dalam literatur politik,

kondisi seperti ini disebut “judicialization of politics” yang tidak selalu menghasilkan kepastian, tetapi memperpanjang konflik elite ke ranah hukum.

3. Pilkada 2015: Sengketa yang Lebih Terkendali

Pilkada 2015 juga menghadirkan sengketa, tetapi lebih sederhana: hanya melalui jalur Mahkamah Konstitusi (Perkara No. 38/PHP.BUP-XIV/2016). Tidak ada tarik-menarik multi-arena seperti 2010. Dalam kerangka akademik, ini menunjukkan penyempurnaan regulasi pemilu pasca-reformasi hukum, di mana MK menjadi satu-satunya pintu sengketa hasil. Meskipun tetap memperlihatkan kecurigaan antar-kandidat, prosesnya lebih singkat, lebih terpusat, dan lebih mudah diterima publik.

4. Pilkada 2020: Kontestasi Modern, Sengketa Multi-Level

Pilkada 2020 kembali membuka babak sengketa multi-level, meski dalam kerangka hukum yang sudah lebih tertata. Persoalan dibawa ke PT TUN Surabaya (Putusan No. 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY), lalu kasasi ke MA (Putusan No. 600 K/TUN/PILKADA/2020), dan diakhiri dengan PHPU di MK (Perkara No. 50/PHP.BUP-XIX/2021).

Fenomena ini mencerminkan dua hal: pertama, para kandidat semakin sadar akan hak hukum mereka dan semakin siap menggunakannya secara maksimal; kedua, kontestasi politik di Manggarai Barat sudah tidak lagi sekadar mengandalkan kekuatan massa, tetapi juga kekuatan dokumen, argumentasi, dan

strategi litigasi. Ini menunjukkan profesionalisasi konflik: keras, tetapi tetap berada dalam koridor konstitusional.

5. Pilkada 2024: Formalisasi Sengketa, Politik yang Semakin Tertib

Pilkada 2024 menghasilkan sengketa hasil pemilihan yang dibawa ke MK (Putusan No. 65/PHPU.BUP-XXIII/2025). Tidak ada eskalasi ke lembaga lain, dan permohonan akhirnya ditolak karena melewati tenggat. Dari sisi hukum, ini menunjukkan kedewasaan prosedural: MK menegaskan bahwa bukan hanya substansi, tetapi kepatuhan pada batas waktu adalah syarat mutlak.

Di sisi politik, hal ini mengirim pesan penting: demokrasi tidak lagi ditentukan semata-mata oleh tensi elite, tetapi juga oleh aturan main yang semakin dihormati. Bagi Manggarai Barat, yang pernah mengalami turbulensi 2010, situasi ini menunjukkan sebuah transisi penting: dari demokrasi penuh energi, menuju demokrasi yang semakin diatur oleh institusi.

6. Pola Besar dan Pelajaran yang Dapat Diambil

Pertama, Sengketa adalah bagian normal dari demokrasi kompetitif. Tidak adanya sengketa justru sering berarti kompetisi lemah atau dominasi elite tunggal. *Kedua*, Kualitas sengketa mencerminkan kualitas sistem. Dari multi-arena yang membingungkan di 2010, menjadi jalur yang lebih jelas dan cepat di 2024. *Ketiga*, Kapasitas eksekusi putusan adalah titik rawan. Sengketa 2010

menunjukkan bahwa hukum tanpa eksekusi yang konsisten menciptakan “legal void” — ruang kosong yang merusak legitimasi negara dan daerah. *Keempat*, Demokrasi lokal makin matang saat konflik diselesaikan dengan sabar dan terukur. Manggarai Barat menunjukkan kemampuan sosialnya menjaga stabilitas, bahkan ketika elite bertarung keras di pengadilan.

Dengan demikian, dinamika sengketa Pilkada Manggarai Barat bukan hanya kisah konflik elite, melainkan proses belajar bersama: elite menguji batas kekuasaan, lembaga hukum mengasah kapasitas, masyarakat mengukur kepercayaan, dan pemerintah daerah belajar menjaga roda pemerintahan tetap berputar di tengah badai politik. Dalam kerangka akademik, inilah tanda bahwa demokrasi lokal di Manggarai Barat telah bergerak dari sekadar eksperimen awal, menuju sistem yang makin institusional, legalistik, dan berdaya tahan tinggi.

Peran Masyarakat Sipil, Media, dan Adat dalam Pilkada

Sejarah Pilkada Manggarai Barat tidak bisa hanya dibaca dari nama-nama yang bertarung atau partai-partai yang berkoalisi. Ada lapisan lain yang sering kali tak tercatat dalam dokumen resmi, tetapi justru menjadi penentu kesehatan demokrasi di tingkat akar rumput: masyarakat sipil, media lokal, dan institusi sosial-budaya seperti adat dan gereja. Ketiganya membentuk ekosistem demokrasi yang memungkinkan Pilkada bukan hanya berlangsung secara prosedural, tetapi juga diterima, diawasi, dan disempurnakan oleh warga sendiri.

1. Masyarakat Sipil: Dari Penonton Menjadi Pengawas

Sejak awal Pilkada langsung, masyarakat Manggarai Barat dikenal partisipatif. Namun sejak 2015, kualitas partisipasi itu meningkat: dari sekadar datang ke TPS menjadi terlibat aktif dalam pemantauan proses pemilu. Muncul kelompok-kelompok relawan yang secara sukarela memantau jalannya pemilihan, baik yang berafiliasi dengan kandidat tertentu maupun yang netral. Diskusi-diskusi publik semakin banyak, baik di ruang formal (seminar, forum akademik, lokakarya) maupun di ruang informal (warung kopi, balai desa, bahkan grup pesan daring).

Di banyak desa, para pemuda mulai mengorganisasi pemantauan mandiri, memotret jalannya penghitungan suara, dan mengunggahnya di media sosial. Fenomena ini memperkecil ruang untuk manipulasi data, meningkatkan kepercayaan publik pada hasil resmi, dan memberi tekanan positif kepada penyelenggara pemilu agar lebih transparan. Dalam literatur demokrasi, fenomena ini disebut sebagai internalisasi budaya akuntabilitas, ketika warga tidak lagi pasif menerima hasil, tetapi ikut menjaga integritas proses.

2. Media Lokal: Percepatan Informasi, Penguatan Kontrol

Sejak 2010, peran media lokal di Manggarai Barat semakin terasa. Jika pada awal Pilkada (2005) informasi politik masih mengandalkan pertemuan tatap muka, surat kabar cetak, dan selebaran, satu dekade kemudian radio lokal dan portal berita daring

mulai memengaruhi ritme politik. Berita kampanye, hasil rekapitulasi sementara, sengketa pemilu, hingga profil kandidat disebarakan dengan cepat, membuka ruang diskusi publik yang lebih luas.

Media lokal tidak hanya melaporkan, tetapi juga mengawal isu-isu penting: ketimpangan pembangunan, masalah infrastruktur, keluhan petani dan nelayan, bahkan kritik terhadap penyelenggara pemilu yang dinilai lamban atau tidak transparan. Kehadiran jurnalis lokal di lapangan menjadi jembatan antara elite politik dan warga biasa. Dari sisi akademik, ini adalah indikator penting bahwa demokrasi lokal telah masuk ke tahap *mediatization of politics*, di mana politik tidak lagi eksklusif di ruang rapat partai, melainkan selalu hadir di ruang publik yang terus diawasi oleh masyarakat melalui kanal informasi terbuka.

3. Adat dan Gereja: Penyangga Moral dan Kanal Konsolidasi Sosial

Manggarai Barat adalah daerah yang religius dan berbudaya kuat. Dalam dua dekade Pilkada, adat dan gereja memainkan peran yang konsisten sebagai penyangga moral di tengah dinamika politik yang kerap panas. Pertemuan adat, misa gereja, dan kegiatan sosial keagamaan seringkali menjadi forum tak resmi untuk meredam konflik, mengonsolidasikan dukungan, atau menegaskan kembali pentingnya persaudaraan di atas perbedaan politik.

Para tokoh adat memiliki pengaruh sosial yang kuat dalam menjaga ketertiban dan mendorong warganya

untuk tetap datang ke TPS, meski berbeda pilihan. Gereja sering mengambil posisi sebagai pengingat etika politik, mengajak umat agar memilih secara bertanggung jawab, menghindari politik uang, dan tetap menjaga persaudaraan pasca pemilu.

Kombinasi adat dan gereja ini memberikan modal sosial yang sangat penting: demokrasi lokal dapat berkembang tanpa kehilangan identitas kultural, dan kontestasi politik tidak merusak tatanan sosial yang lebih besar. Dalam banyak kasus, forum adat dan keagamaan bahkan menjadi tempat negosiasi awal, tempat kandidat meyakinkan masyarakat tanpa harus mengorbankan harmoni lokal.

Dari perspektif akademik, keterlibatan masyarakat sipil, media, dan institusi sosial-budaya ini menunjukkan bahwa demokrasi Manggarai Barat tidak tumbuh di ruang kosong. Ia hidup di dalam jaringan sosial yang adaptif: terbuka pada inovasi, tetapi tetap menjaga kearifan lokal. Inilah yang membuat Manggarai Barat mampu melewati berbagai periode politik — dari euforia awal, turbulensi hukum, hingga polarisasi modern — tanpa harus kehilangan stabilitas sosialnya.

Implikasi Ekonomi dan Pariwisata terhadap Politik Lokal

Dalam dua dekade terakhir, satu variabel baru pelan-pelan masuk ke ruang politik Manggarai Barat: pariwisata premium. Labuan Bajo, yang semula hanya sebuah kota pelabuhan kecil di ujung barat Flores, kini menjelma menjadi salah satu destinasi super prioritas nasional. Perubahan ini bukan sekadar cerita tentang

meningkatnya kunjungan wisatawan, melainkan pergeseran struktur ekonomi, distribusi peluang, dan tentu saja, kalkulasi politik.

Bagi kandidat kepala daerah, kehadiran Labuan Bajo sebagai etalase pariwisata Indonesia Timur menciptakan dilema baru. Mereka tidak cukup hanya menjanjikan pembangunan infrastruktur dasar atau perbaikan layanan publik; mereka harus menyusun narasi politik yang seimbang: bagaimana mengelola arus investasi nasional tanpa membuat warga lokal merasa tersisih? Bagaimana mendamaikan tuntutan pasar pariwisata kelas dunia dengan kebutuhan masyarakat yang sehari-hari berurusan dengan harga sembako, akses pendidikan, dan jaminan kesehatan?

Dilema ini segera berubah menjadi isu kampanye yang berulang. Di satu sisi, kandidat yang pro-pengembangan pariwisata cenderung menekankan pentingnya investasi besar-besaran, pembangunan hotel berbintang, dan modernisasi kota sebagai pintu masuk wisatawan internasional. Di sisi lain, kelompok yang lebih berhati-hati mengangkat narasi keadilan wilayah: agar daerah pedalaman, desa pertanian, dan pulau-pulau kecil tidak menjadi penonton dari kemajuan yang terkonsentrasi di Labuan Bajo.

Ketimpangan darat-kepulauan, pusat wisata-daerah pedalaman menjadi tema panas di tiap Pilkada. Warga di pulau-pulau sering kali merasa pelayanan publik bergerak lebih lambat dibandingkan di wilayah daratan. Sebaliknya, masyarakat di kawasan wisata strategis menikmati percepatan infrastruktur, layanan, dan akses ekonomi baru. Dari perspektif politik, celah inilah yang dieksploitasi kandidat: sebagian menjanjikan “pemerataan arus pariwisata”, sebagian lain

memfokuskan kampanye pada “penguatan basis ekonomi lama” seperti pertanian dan perikanan agar tidak kalah penting dibanding sektor jasa.

Tidak kalah signifikan adalah dampak jangka panjangnya terhadap struktur elite lokal. Ketika sektor jasa dan hospitality tumbuh pesat, muncul kelompok baru yang sebelumnya tidak terlalu dominan dalam arena politik: pengusaha hotel, operator wisata, asosiasi transportasi laut, komunitas pemandu wisata, bahkan manajemen properti dan investor lokal. Mereka membawa jejaring modal, hubungan bisnis, dan strategi komunikasi yang berbeda dari elite politik tradisional yang biasanya bersandar pada patronase birokrasi, adat, atau partai.

Kelompok-kelompok baru ini bukan hanya pemilik modal ekonomi, tetapi juga modal sosial-politik. Mereka mendanai kampanye, membangun narasi berbasis “modernisasi Manggarai Barat”, dan menghubungkan kandidat dengan jejaring bisnis tingkat provinsi hingga nasional. Perlahan, mereka mengubah peta dukungan politik: dukungan tidak lagi ditentukan semata-mata oleh loyalitas kultural atau partai, tetapi juga oleh kalkulasi kepentingan ekonomi yang terkait erat dengan arah kebijakan pariwisata.

Secara akademik, dinamika ini mencerminkan proses yang disebut ekonomi politik sektor unggulan: ketika satu sektor ekonomi (dalam hal ini pariwisata premium) menjadi lokomotif pembangunan, ia bukan hanya memengaruhi angka PDRB, tetapi juga memodifikasi distribusi kekuasaan di tingkat lokal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat atau justru mengganggu keseimbangan politik, tergantung sejauh mana kepemimpinan daerah mampu mengelola harmoni

antara investasi nasional, identitas lokal, dan pemerataan kesejahteraan.

Evaluasi Kelembagaan: KPU, Bawaslu, dan Penegakan Hukum Pilkada

Demokrasi lokal bukan hanya ditentukan oleh siapa yang bertarung atau apa yang dijanjikan, tetapi juga oleh seberapa baik sistem bekerja. Pilkada yang damai, jujur, dan diterima hasilnya oleh publik bergantung pada penyelenggara yang profesional, pengawas yang independen, serta penegakan hukum yang konsisten. Perjalanan Pilkada Manggarai Barat sejak 2005 hingga 2024 menunjukkan proses pendewasaan kelembagaan — dari langkah-langkah awal yang penuh keterbatasan, menuju profesionalisasi yang lebih baik, meski sesekali tersandung di lapangan.

1. KPU Manggarai Barat: Dari Infrastruktur Dasar ke Manajemen Kompleksitas

Pada Pilkada perdana tahun 2005, KPU Manggarai Barat bekerja hampir dari nol. Infrastruktur belum siap, jaringan logistik masih bergantung pada moda transportasi darat dan laut sederhana, dan pengalaman teknis masih terbatas. Namun, dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, Pilkada pertama berhasil digelar lancar dan dipercaya publik.

Seiring waktu, kapasitas teknis meningkat. Prosedur makin rapi, tahapan makin terukur, dan pemanfaatan teknologi informasi mulai diterapkan. Meski demikian, profesionalisasi ini tidak bebas dari cacat. Kasus tahun 2015 menjadi catatan penting: penolakan pendaftaran pasangan calon Fidelis Pranda–Benyamin

Paju menimbulkan sengketa panjang dan berujung teguran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Insiden ini memperlihatkan bahwa ketelitian administratif sama pentingnya dengan logistik dan teknis, karena setiap kelalaian prosedural dapat memicu krisis legitimasi.

Secara umum, KPU Manggarai Barat menunjukkan kemampuan belajar institusional yang baik — semakin siap menghadapi kompleksitas kontestasi, semakin terbiasa bekerja dengan tekanan politik, dan semakin piawai mengelola ritme pemilu dalam kalender nasional yang serentak.

2. Bawaslu Manggarai Barat: Dari Formalitas ke Fungsi Substansial

Jika pada awal Pilkada peran pengawas pemilu lebih banyak bersifat administratif, sejak 2020 fungsinya semakin terasa. Panitia Pengawas (Panwaslih) yang kemudian berkembang dalam struktur Bawaslu Kabupaten mulai mengambil peran proaktif: merespons laporan pelanggaran, mengeluarkan rekomendasi, bahkan menegur aparat desa dan ASN yang tidak netral.

Namun, tantangan tetap ada. Di beberapa kasus, kecepatan respon terhadap sengketa lapangan belum maksimal. Misalnya, konflik administratif yang berlarut-larut di tahap pencalonan kerap merembet ke arena hukum karena pengawas tidak segera menuntaskan atau memediasi persoalan di tahap awal. Secara akademik, ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas independensi dan kecepatan

intervensi agar Bawaslu dapat menjadi filter pertama sebelum sengketa menjalar ke meja pengadilan.

3. Penegakan Hukum: Arena Formal Konflik Politik

Sejak awal, jalur hukum selalu menjadi “bab lanjutan” dari pertarungan di bilik suara. Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) beberapa kali menjadi arena perpanjangan konflik politik Manggarai Barat.

Kasus tahun 2010 adalah contoh klasik: hasil Pilkada yang sudah diputus MK, kemudian dipersoalkan kembali di PTUN, dimenangkan oleh pihak yang kalah Pilkada, dibatalkan oleh MA — tetapi putusannya tidak dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, Manggarai Barat sempat diperintah oleh kepala daerah yang secara hukum telah kehilangan legitimasi formal, namun secara politik tetap menjabat hingga akhir periode.

Dari sisi normatif, kondisi ini problematis; dari sisi pragmatis, ini mencerminkan dilema klasik demokrasi daerah: stabilitas pemerintahan sering dipilih di atas kepatuhan penuh terhadap putusan hukum, terutama jika eksekusi dianggap berisiko menciptakan kekosongan kekuasaan atau kerusakan sosial.

Pilkada 2015 dan 2020 juga membawa sengketa ke MK, meski relatif lebih cepat terselesaikan. Pilkada 2024 kembali menguji sistem, kali ini bukan soal hasil substantif, melainkan soal tenggat waktu pengajuan sengketa yang tidak terpenuhi, sehingga MK menolak

permohonan tanpa memeriksa pokok perkara. Dalam kacamata akademik, ini menegaskan bahwa kepastian hukum semakin menjadi faktor penentu, bukan hanya kebenaran faktual di lapangan.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan dan penegakan hukum Pilkada Manggarai Barat dalam 20 tahun terakhir menunjukkan proses profesionalisasi bertahap. Ada lonjakan kapasitas teknis, ada penguatan peran pengawas, dan ada penegasan supremasi jalur hukum atas konflik politik. Namun, tantangan klasik tetap ada: memastikan setiap putusan dapat dieksekusi, memperkecil celah kesalahan administratif, dan menjaga agar kepercayaan publik tidak hanya bertumpu pada hasil akhir, tetapi juga pada integritas proses dari awal hingga akhir.

BAB VII

PENUTUP

Dua dekade perjalanan Pilkada di Manggarai Barat mengajarkan satu hal yang jelas: demokrasi bukanlah peristiwa satu kali, melainkan proses yang terus bergerak, beradaptasi, dan mencari keseimbangannya sendiri. Dari euforia awal setelah pemekaran, melalui fase konsolidasi kekuasaan, hingga kontestasi yang makin modern dan terhubung dengan dinamika nasional, Manggarai Barat telah mengalami semua lapisan pengalaman demokrasi lokal yang kaya.

Salah satu keberhasilan terbesar dari 20 tahun Pilkada adalah bagaimana masyarakat tetap mau terlibat. Partisipasi pemilih memang turun perlahan dari hampir 90 persen pada awalnya ke kisaran 70 persen pada 2024, tetapi angka itu tetap tinggi jika dibandingkan rata-rata nasional. Penurunan ini tidak semata karena apatisme, melainkan gejala normalisasi: warga mulai bersikap lebih kritis, lebih selektif, dan lebih rasional. Demokrasi di Manggarai Barat tidak lagi bergantung pada euforia, melainkan bertumpu pada kebiasaan berpolitik yang makin matang.

Regenerasi kepemimpinan juga berlangsung relatif mulus. Dari para pendiri yang membawa aspirasi pemekaran, ke figur-figur teknokrat yang fokus pada pembangunan, hingga munculnya generasi kedua yang berani masuk ke arena kontestasi, proses ini memperlihatkan bahwa politik di Manggarai Barat tidak mandek pada nama lama.

Setiap pergantian figur membawa warna baru, meski tetap berdialog dengan masa lalu.

Dari sisi sistem, integrasi politik lokal dengan logika nasional membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, koordinasi pembangunan menjadi lebih mudah. Dukungan partai-partai besar membantu mempercepat akses anggaran dan jaringan strategis ke tingkat provinsi maupun pusat. Di sisi lain, ruang kompromi lokal semakin sempit. Keputusan koalisi, arah program, dan bahkan narasi kampanye makin ditentukan oleh kalkulasi pusat, sehingga risiko terlepasnya partai dari denyut aspirasi lokal juga makin besar.

Meski demikian, satu hal tetap menonjol: stabilitas sosial. Bahkan di saat kontestasi paling panas dan sengketa hukum berlarut-larut, tidak ada konflik horizontal besar. Adat, gereja, dan jejaring sosial tradisional berfungsi sebagai pagar moral, memastikan perbedaan pilihan tidak merusak jaringan persaudaraan yang lebih dalam. Inilah modal sosial yang, dalam banyak kasus di daerah lain, justru rentan runtuh di bawah tekanan politik kompetitif.

Namun, sejumlah tantangan tetap membayangi. Kejenuhan politik mulai terasa; sebagian warga, terutama pemilih muda, meragukan apakah Pilkada benar-benar membawa perubahan substantif bagi hidup mereka. Ketimpangan pembangunan antara Labuan Bajo dan pedalaman, antara daratan dan pulau, terus menjadi sumber keluhan dan sumber daya kampanye yang selalu diulang, tetapi belum sepenuhnya diatasi. Sengketa hukum, meski makin rapi secara prosedural, belum selalu menghasilkan kepastian eksekusi yang tegas, meninggalkan jejak keraguan atas supremasi hukum di mata sebagian publik.

Rekomendasi yang muncul dari refleksi panjang ini jelas menyasar tiga aktor utama: penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerintah daerah. Penyelenggara pemilu perlu merancang logistik dan prosedur yang lebih adaptif untuk wilayah kepulauan, mempercepat resolusi sengketa administratif agar tidak berkembang menjadi krisis hukum, dan menyegarkan strategi sosialisasi agar antusiasme warga tidak terus turun. Partai politik perlu kembali menghidupkan kaderisasi lokal, bukan hanya mengimpor keputusan dari pusat, serta membangun kampanye berbasis gagasan yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari warga, bukan sekadar memainkan peta koalisi. Pemerintah daerah, pada gilirannya, harus berani mengambil kebijakan afirmatif untuk wilayah yang tertinggal, mengelola pariwisata premium dengan memastikan manfaat langsung bagi warga lokal, dan memperluas forum dialog lintas kelompok untuk merawat harmoni di tengah kompetisi politik yang makin profesional.

Ke depan, strategi peningkatan kualitas demokrasi di daerah kepulauan seperti Manggarai Barat harus berpijak pada realitas geografis, sosial, dan ekonomi. Pemilu yang inklusif dan adaptif harus mengakui tantangan logistik pulau-pulau kecil, baik dengan memanfaatkan teknologi, TPS khusus, atau jadwal yang disesuaikan. Penguatan ekonomi lokal penting untuk mengurangi politik berbasis patronase; masyarakat yang lebih sejahtera lebih bebas memilih berdasarkan visi, bukan transaksi. Digitalisasi pengawasan harus membuka ruang bagi warga di daerah terpencil untuk ikut mengawal proses secara langsung. Sementara itu, adat dan gereja — dua pilar yang terbukti menjaga keseimbangan sosial — sebaiknya dilibatkan lebih sistematis sebagai mitra dalam edukasi politik, mediasi konflik, dan penguatan etika publik.

Akhirnya, dua dekade ini membuktikan bahwa demokrasi di Manggarai Barat adalah organisme hidup: ia tumbuh, belajar, dan menguji dirinya sendiri di tengah arus perubahan yang tak selalu mudah ditebak. Jika pelajaran-pelajaran ini dikelola dengan bijak, Manggarai Barat berpeluang menjadi salah satu contoh daerah kepulauan yang berhasil menggabungkan dinamika politik modern dengan kekuatan kulturalnya — sebuah demokrasi lokal yang matang, tangguh, dan relevan dengan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah. (2005).
8. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020. (2020).
9. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 131/966/OTDA Tahun 2021. (2021).

Putusan Pengadilan

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 600 K/TUN/PILKADA/2020. (2020, November 9).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Manggarai Barat Tahun 2010. (2010).
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020. (2021).
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024. (2025).
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP.XIV/2016 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2015. (2016).
6. Putusan Nomor 4/G.PILKADA/2020/PT.TUN.SBY tentang Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2020. (2020).
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.26-1355 tentang Penetapan Wilayah Kerja Pembantu Bupati Manggarai Bagian Barat. (1982, November 11).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-XXX/2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat. (2005).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-114 Tahun 2016. (2016).
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-294 Tahun 2021. (2021).

11. Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 41a/Kpts/KPU-Kab/Kota-018434062/2010 tentang Perubahan Pertama Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2010. (2010, Mei 4).
12. Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 90/PL.02.3-Kpt/5315/KPU-Kab/IX/2020. (2020, September 23).
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Periode 2024–2029. (2025).

Buku

1. Arsip Nasional Republik Indonesia. (2018). *Citra Kabupaten Manggarai Barat dalam Arsip*. Jakarta: ANRI.
2. Barat Daya, B. (2016). *Kicauan tak terdengar: Penggalan memoar seorang aktivis*. Penerbit WR.

Laporan Resmi Dan Media

1. Akademi Militer Magelang. (2025, Februari 21–28). *Program retreat kepemimpinan kepala daerah serentak 2024*.
2. Arsip KPU RI. (2004). *Keputusan KPU tentang pembentukan KPU Kabupaten Manggarai Barat*.
3. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2003, September 1). *Dokumen pelantikan pejabat Bupati Manggarai Barat*. Arsip berita daerah.
4. Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2002). *Profil daerah Kabupaten Manggarai sebelum pemekaran*.

5. Bappeda Provinsi NTT & Tim Penataan Daerah (TPD). (2001–2003). *Laporan profil daerah sebelum pemekaran*.
6. KPU Kabupaten Manggarai Barat. (2005). *Laporan akhir penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat 2005*.
7. KPU Kabupaten Manggarai Barat. (2010). *Laporan tahapan Pilkada Manggarai Barat 2010*.
8. KPU Kabupaten Manggarai Barat. (2015). *Laporan tahapan Pilkada Manggarai Barat 2015*.
9. KPU Kabupaten Manggarai Barat. (2020). *Laporan tahapan Pilkada Manggarai Barat 2020*.
10. KPU Kabupaten Manggarai Barat. (2024). *Laporan tahapan Pilkada Manggarai Barat 2024*.

Media Online / Website

1. DKPP. (n.d.). KPU dan Panwaslih Manggarai Barat diperingatkan. <https://dkpp.go.id/kpu-dan-panwaslih-manggarai-barat-diperingatkan>
2. KPU Kabupaten Manggarai Barat. (2025, September 7). Sejarah KPU Manggarai Barat. <https://kab-manggarai Barat.kpu.go.id/page/read/sejarah-kpu-manggrai-barat>
3. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (2025). Sekilas Kabupaten Manggarai Barat. <https://manggarai Barat.kab.go.id/halaman/sejarah-manggarai-barat.html>
4. Kementerian Kehutanan. (2004). Profil Taman Nasional Komodo. <https://tnkomodo.ksdae.kehutan.go.id/>

Wawancara

Wawancara dengan Yohanes Parang, tokoh adat Manggarai Barat, oleh wartawan Harian Pos Kupang, edisi 5 Juli 2005

PROFIL PENULIS



Kris Bheda Somerpes, adalah alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta dan sekarang menjadi anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat periode 2019-2024 dan 2024-2029. Pada periode pertama membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Periode kedua membidangi Divisi Hukum dan Pengawasan.



PUSLITBANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

